



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2018**

DINAS PERIKANAN

Jl. Mangga 2 No.49 Tanjung Redeb



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	iii
Ikhtisar Eksekutif	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	ix
Daftar Lampiran	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pembentukan SKPD	1
B. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kab. Berau	2
C. Sumber Daya Aparatur	22
D. Permasalahan utama dan Isu-isu Strategis	27
E. Maksud, Tujuan dan Manfaat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	29
F. Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	30
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	31
A. Rencana Strategis	31
A.1 Visi	33
A.2 Misi	33
A.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	34
B. Indikator Kinerja Utama	35
C. Rencana Kinerja Tahunan	36
D. Perjanjian Kinerja	36



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	40
3.1. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	40
3.2. Capaian Kinerja Tahun 2018	44
3.2.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2018	44
3.3. Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2018	46
3.4. Realisasi Anggaran	72
1. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung	73
2. Realisasi Anggaran Belanja Langsung	73

BAB IV. PENUTUP	80
------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018**
- 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018**
- 3. Pengukuran Kinerja Tahun 2018**
- 4. Indikator Kinerja Utama 2016-2021**
- 5. SOP Pengumpulan Data**



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya kami dapat menyusun Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Berau Tahun 2018 dengan baik tanpa suatu hambatan yang berarti.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Berau Tahun 2018, merupakan salah satu bentuk perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perikanan tahun anggaran 2018 dan merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2018, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi instansi dalam mencapai itujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Lebih jauh LKjIP Dinas Perikanan Kabupaten Berau ini diharapkan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* dan juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Dinas Perikanan Kabupaten Berau telah menyusun LKjIP Tahun 2018 dengan pedoman yang terbaru yakni berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP) dan PermenPAN& RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan disusunnya LKjIP ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LKjIP Tahun 2018 ini. Mudah-mudahan dengan LKjIP ini menjadikan Dinas Perikanan Kabupaten Berau adalah



instansi yang transparan dan berakuntabilitas serta dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.

Tanjung Redeb, Februari 2019

Plt. Kepala Dinas



Ir. Hj. Fenteram Rahayu

Pembina Tingkat 1

NIP. 19671101 199803 1 004



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Berau Tahun 2017 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). LKjIP ini tentunya masih jauh dari sempurna namun ini merupakan langkah dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean governance) dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKjIP Dinas Perikanan Kabupaten Berau Tahun 2018 disusun dengan mengacu pada petunjuk teknis perjanjian kerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah yaitu PermenPAN& RB No. 53 Tahun 2014.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Berau juga disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaannya, yang dapat dilihat dari evaluasi pengukuran kinerja atas perjanjian kinerja yang telah disepakati serta perbandingan pencapaian/evaluasi kinerja selama 5 tahun dari Tahun 2016-2021, dimana Tahun 2018 merupakan tahun ke-3 tahun Renstra Dinas Perikanan Kab. Berau

Jika dulu keberhasilan instansi dilihat dari anggaran pemerintah yang terserap 100% maka pada saat ini pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) berdasarkan pada pencapaian sasaran yang tertera pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Tahun 2018 merupakan tahun ketiga dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2016-2021. Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran tersebut dijabarkan dalam 9 (sembilan) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan.

Dinas Perikanan pada Tahun 2018 melaksanakan 2 (dua) sasaran strategis. Sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Tahun 2018. Sasaran ke-1 memperlihatkan predikat **Sangat Berhasil** dengan nilai capaian 102.63 % dan sasaran ke-2 memperlihatkan predikat **Berhasil** dengan nilai capaian 88.89 % . Nilai tersebut diperoleh dari rata-rata indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kab. Berau.

Dari aspek keuangan, Dinas Perikanan Tahun 2018 berdasarkan DPPA nomor 3.01.01.01. Tahun 2018 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 7,408,908,000,- yang digunakan untuk



membayai program kegiatan yang bersumber dana APBD Kabupaten Berau dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 6,006,813,743,- (**81.08 %**), sedangkan program kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) dengan anggaran Rp.8,500,000,000 baru terealisasi sebesar Rp. 204,806,254,- atau sebesar 2.41 %.



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	22
Tabel 2	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	22
Tabel 3	PNS berdasarkan jenjang jabatan	23
Tabel 5	Sarana dan prasarana Dinas Perikanan	23
Tabel 6	Masalah, Faktor/Akar masalah	28
Tabel 7	Matrik Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2016-2021	32
Tabel 8	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	35
Tabel 9	Target Indikator Kinerja Tahun 2016-2021	35
Tabel 10	Perjanjian Kinerja Th.2018	37
Tabel 11	Program dan Pagu Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2018	37
Tabel 12	Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Evaluasi LKJIP oleh Inspektorat	40
Tabel 13	Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2018	45
Tabel 14	Tingkat capaian (predikat) Kinerja Sasaran Dinas Perikanan Tahun 2018	46
Tabel 15	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 terhadap Target Tahun 2018	47
Tabel 16	Capaian Produksi dari Sub Sektor Perikanan Tangkap PER Triwulan Th.2018	47
Tabel 17	Capaian Produksi per Jenis Ikan dari Sub Sektor Perikanan Laut Th. 2018	48
Tabel 18	Capaian Produksi per Jenis Ikan dari Sub Sektor Penangkapan perairan umum Th. 2018	49
Tabel 19	Capaian Produksi dari Sub Sektor Perikanan Budidaya Th. 2018	50
Tabel 20	Capaian Produksi per Jenis Ikan dari Sub Sektor Perikanan Budidaya Th. 2018	50



Tabel 21	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya	51
Tabel 22	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Target dalam Renstra	52
Tabel 23	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Target Nasional	52
Tabel 24	Data Paket Baktuan kepada Kelompok Nelayan Tahun 2018	54
Tabel 25	Alokasi per Sasaran dan Capaiannya	60
Tabel 26	Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya	61
Tabel 27	Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran	62
Tabel 28	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 terhadap Target Tahun 2018	66
Tabel 29	Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan yang Naik Kelas	66
Tabel 30	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya	68
Tabel 31	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Target dalam Renstra	69
Tabel 32	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Target Nasional	69
Tabel 33	Alokasi per Sasaran dan Capaiannya	71
Tabel 34	Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya	71
Tabel 35	Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran	72
Tabel 36	Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Th. 2018	73
Tabel 37	Realisasi Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Dinas Perikanan Th. 2018	74
Tabel 38	Realisasi Anggaran yang Bersumber dari DBH-DR Th.2018 (Multiyears)	79



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	51
Grafik 2	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	51



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
- Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018
- Lampiran 3. Pengukuran Kinerja 2018
- Lampiran 4. Reviu Indikator Kinerja Utama 2016-2021
- Lampiran 5. SOP Pengumpulan Data





BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan



- Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau.
 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau
 11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
 12. Peraturan Bupati Berau Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Berau.

B. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Berau

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 70 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Berau. Tugas pokok dari Dinas Perikanan Kabupaten Berau adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah Kabupaten Berau di bidang perikanan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Kedudukan organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Berau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Perikanan, terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
 - Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset

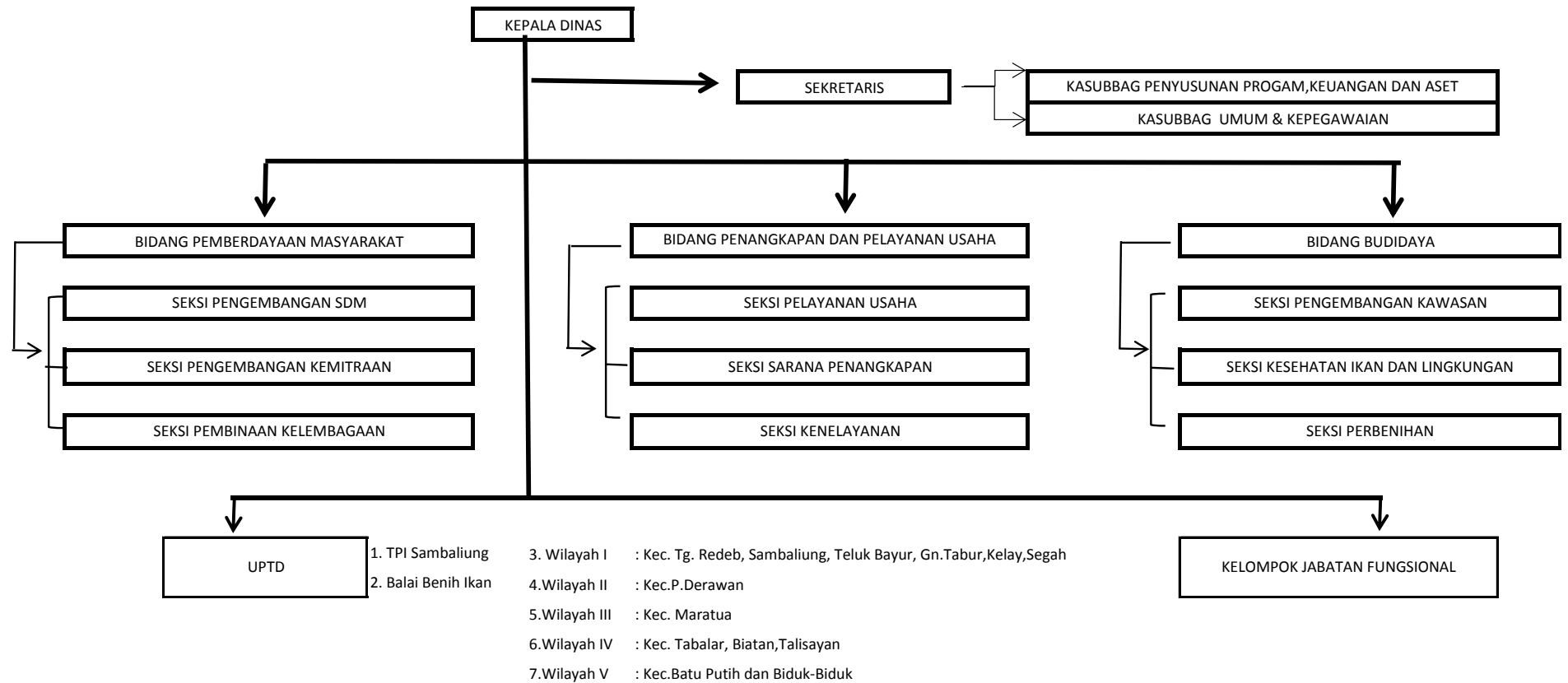


- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi:
 - Seksi Pengembangan SDM
 - Seksi Pengembangan Kemitraan
 - Seksi Pembinaan Kelembagaan
- 4. Bidang Penangkapan dan Pelayanan Usaha, membawahi:
 - Seksi Pelayanan Usaha
 - Seksi Sarana Penangkapan
 - Seksi Kenelayan
- 5. Bidang Budidaya, membawahi:
 - Seksi Pengembangan Kawasan
 - Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
 - Seksi Perbenihan
- 6. UPTD;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan pada Perda SOTK tersebut struktur organisasi pada Dinas Perikanan Kabupaten Berau dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
BAGAN STRUKTUR DINAS PERIKANAN KAB. BERAU





Dinas Perikanan merupakan unsur pendukung penyelenggara pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas Perikanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kepala Dinas dibantu oleh Bagian Sekretariat dibantu oleh dua (2) Sub Bagian dan tiga (3) Kepala Bidang dimana dibantu oleh para Kepala Seksi pada Bidang masing-masing, dimana masing-masing Kepala Seksi membawahi staf pelaksana dalam jenjang jabatan fungsional umum / non struktural.

Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kelautan dan perikanan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahanserta pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan.
- d. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- e. Pelaksanaan UPTD
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok mendukung Bupati dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan Dinas Perikanan serta mengadakan hubungan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya.



KEPALA DINAS

Tugas Pokok:

Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perikanan dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan Dinas serta mengadakan hubungan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya.

Rincian tugas:

- a. Merencanakan pembangunan di bidang Perikanan di Dinas Perikanan yang sejalan dengan rencana dan strategi pembangunan Daerah.
- b. Menggerakkan organisasi Dinas Perikanan sesuai dengan rencana dan strategi pembangunan yang telah disusun untuk tercapainya tujuan.
- c. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan program pembangunan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan.
- d. Membina dan membagi tugas kepada bawahan untuk menciptakan kinerja yang baik dalam organisasi.
- e. Mempelajari peraturan – peraturan yang berhubungan dengan bidang perikanan di Dinas Perikanan serta pemerintahan sebagai referensi pembuatan kebijakan.
- f. Memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta mengesahkan hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- g. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dan kegiatan Dinas Perikanan sebagai pembinaan karier serta penilain terhadap keberhasilan kegiatan.
- h. Mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap satuan organisasi secara berjenjang.
- i. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.
- j. Menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



SEKRETARIAT

Tugas pokok:

Melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan di bidang pengelolaan ketatausahaan yang meliputi administrasiperencanaan, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan Dinas Perikanan dengan memberikan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi Dinas Perikanan.

Rincian tugas:

- a. Merencanakan kegiatan pada Bagian Sekretariat dalam hal perencanaan program, adminitrasi dan kepegawaian, perlengkapan dan keuangan sebagai pedoman kerja.
- b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perencanaan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan sebagai dasar dan pedoman membuat keputusan.
- c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkup Bagian Sekretariat supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan.
- d. Membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan untuk terlaksananya peningkatan kinerja bawahan.
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program Dinas Perikanan dengan semua bidang supaya didapat program kerja yang baik dan efektif dan mampu mengakomodasi semua keperluan dan kegiatan Dinas Perikanan.
- f. Menyelenggarakan administrasi umum Dinas Perikanan berupa pengaturan surat-menyurat, penyusunan peranturan-peraturan dan ketatausahaan lainnya agar dipenuhinya tertib adminstrasi.
- g. Menyelenggarakan koordinasi pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang perikanan di Dinas Perikanan untuk mengetahui tingkat keberhasilannya.
- h. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara/pemerintah dan mengawasi pemakaiannya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perikanan.
- i. Menyelenggarakan administrasi keuangan Dinas Perikanan untuk dicapainya tertib admnistrasi keuangan dan pemakaian keuangan negara yang efektif dan efisien.



- j. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.
- k. Membuat laporan kegiatan Bagian Sekretariat dan laporan kegiatan Dinas Perikanan Daerah secara bulanan, tahunan maupun periodik sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM, KEUANGAN DAN ASET

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bagian Sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi penyusunan program pembangunan bidang perikanan, mengidentifikasi permasalahan, pengumpulan data, mengevaluasi dan memonitor kegiatan, penatausahaan keuangan dan barang milik daerah dan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Dinas Perikanan.

Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset sebagai pedoman kerja sub bagian dalam melaksanakan tugas untuk tertibnya pelaksanaan kegiatan.
- b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perencanaan, evaluasi dan pendataan serta penyusunan laporan, keuangan dan perbendaharaan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
- c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkup Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan.
- d. Membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset untuk terlaksananya peningkatan kinerja bawahan.
- e. Menyelenggarakan Koordinasi dan merumuskan Rencana Strategis (Renstra), program lima tahunan dan tahunan, pedoman atau petunjuk pelaksanaan program pembangunan bidang perikanan di dinas perikanan di lintas kecamatan.
- f. Menyelenggarakan Sosialisasi Rencana Strategis, program pembangunan lima tahunan dan tahunan bidang perikanan di Dinas Perikanan di lintas kecamatan.
- g. Mengidentifikasi dan menganalisa sasaran dan kebutuhan rencana program pembangunan bidang perikanan di Dinas Perikanan di lintas kecamatan.



- h. Menyelenggarakan penyusunan anggaran program/kegiatan pembangunan bidang bidang perikanan di Dinas Perikanan baik APBD maupun APBN.
- i. Memonitoring pelaksanaan kegiatan secara aktif dan pasif melalui peninjauan dan pemeriksaan langsung ke laporan, laporan bulanan, triwulan maupun tahunan.
- j. Melakukan koordinasi analisa, evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan bidang perikanan di Dinas Perikanan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan penyimpangannya.
- k. Mengkoordinasikan penyusunan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan intern terhadap pelaksanaan program pembangunan.
- l. Mengkoordinasikan penyusunan evaluasi dan laporan program, akuntabilitas kinerja dan tugas-tugas umum Dinas Perikanan lainnya agar didapat laporan yang akurat dan akuntabel.
- m. Membuat laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan setiap tahun.
- n. Menyiapkan bahan hasil pembangunan bidang perikanan di Dinas Perikanan untuk laporan pertanggung jawaban Bupati.
- o. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.
- p. Menyusun laporan Dinas Perikanan baik bulanan, triwulan maupun tahunan.
- q. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- r. Menyelenggarakan pengajuan penerbitan SKO, SPP dan SPMU sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- s. Menyelenggarakan pembukuan, verifikasi dan pertanggung jawaban keuangan Dinas Perikanan.
- t. Mengontrol dan mengawasi pembukuan Dinas Perikanan untuk terciptanya tertib administrasi keuangan.
- u. Memonitor dan mengawasi pemakaian aset Dinas Perikanan berupa barang bergerak maupun tidak bergerak untuk mengetahui efektifitasnya.
- v. Memelihara dan mendata perlengkapan Dinas Perikanan baik bergerak maupun tidak bergerak untuk tercapainya tertib administrasi perlengkapan.
- w. Melaksanakan administrasi, inventarisasi dan laporan pertanggung jawaban pengelolaan barang



- x. Mengusulkan penghapusan barang milik daerah
- y. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tugas pokok:

Melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bagian Sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan Dinas Perikanan.

Rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman kerja sub bagian dalam melaksanakan tugas.
- b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan administrasi umum, perlengkapan dan kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan tugas.
- c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan.
- d. Membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk terlaksananya peningkatan kinerja bawahan.
- e. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan serta ketatausahaan lainnya untuk tercapainya tertib administrasi.
- f. Merencanakan kebutuhan pegawai pada Dinas Perikanan sebagai penunjang kelancaran pekerjaan.
- g. Merencanakan dan mengadakan kebutuhan perlengkapan Dinas Perikanan baik berupa sarana prasana kantor dan pendukung kerja lainnya.
- h. Menganalisa dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian berupa kenaikan pangkat, gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan lain-lain.
- i. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan sebagai bahan pembinaan kepegawaian.
- j. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasantentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.
- k. Menyusunan laporan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggung jawaban tugas.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.



BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana dan program pengembangan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan
- b. Melaksanakan pengembangan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan
- c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan
- d. Menyusun rencana dan program fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan
- e. Melaksanakan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan
- g. Menyusun rencana dan program pembinaan kelembagaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan
- h. Melaksanakan pembinaan kelembagaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan
- i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan kelembagaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan
- j. Pelaksanaan administrasi bidang Pemberdayaan Masyarakat
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan



SEKSI PENGEMBANGAN SDM

Tugas Pokok :

Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.

Rincian Tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi nelayan dan pembudidaya dalam rangka pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada nelayan dan pembudidaya kecil.
- b. Melaksanakan analisis kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada nelayan dan pembudidaya kecil
- c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada nelayan dan pembudidaya kecil
- d. Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada nelayan dan pembudidaya kecil
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada nelayan dan pembudidaya kecil
- f. Melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi dalam rangka pendampingan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- g. Melaksanakan analisis kebutuhan pendampingan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- h. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan penyelenggaraan pendampingan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- i. Melaksanakan pendampingan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendampingan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- k. Pelaksanaan administrasi Seksi Pengembangan SDM
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat



SEKSI PENGEMBANGAN KEMITRAAN

Tugas Pokok :

Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.

Rincian Tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi untuk fasilitasi kemitraan usaha, akses permodalan dan usaha.
- b. Melaksanakan analisis kebutuhan fasilitasi kemitraan usaha, akses permodalan dan usaha nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan
- c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan fasilitasi kemitraan usaha, akses permodalan dan usaha nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan
- d. Melaksanakan fasilitasi kemitraan usaha, akses permodalan dan usaha nelayan kecil usaha kecil pembudidayaan ikan
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, akses permodalan dan usaha nelayan kecil usaha kecil pembudidayaan ikan
- f. Melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi untuk pemberian akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- g. Melaksanakan analisis kebutuhan pemberian akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- h. Melaksanakan penyiapan perumusan pemberian akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- i. Melaksanakan pemberian akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberian akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- k. Pelaksanaan administrasi Seksi Pengembangan Kemitraan



1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

SEKSI PEMBINAAN KELEMBAGAAN

Tugas Pokok :

Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pembinaan kelembagaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.

Rincian Tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi pengembangan dan penguatan kelembagaan kelompok nelayan dan pembudidayaan ikan.
- b. Melaksanakan analisis kebutuhan pengembangan dan penguatan kelembagaan kelompok nelayan dan pembudidaya ikan
- c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan pengembangan dan penguatan kelembagaan kelompok nelayan dan pembudidaya ikan
- d. Melaksanakan pengembangan dan penguatan kelembagaan kelompok nelayan dan pembudidaya ikan
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan penguatan kelembagaan kelompok nelayan dan pembudidaya ikan
- f. Melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi pengembangan dan penguatan kelembagaan usaha nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan
- g. Melaksanakan analisis kebutuhan pengembangan dan penguatan kelembagaan usaha nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- h. Melaksanakan pengembangan dan penguatan kelembagaan usaha nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan
- i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan penguatan kelembagaan usaha nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan
- j. Pelaksanaan administrasi Seksi Pengembangan Kelembagaan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kepala
- l. Bidang Pemberdayaan Masyarakat



BIDANG PENANGKAPAN DAN PELAYANAN USAHA

Tugas Pokok:

Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) serta pengembangan sarana prasarana dan perlindungan nelayan.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana dan program penerbitan SIUP, Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH)
- b. Melaksanakan penerbitan SIUP, TPUPI dan TPKPIH
- c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerbitan SIUP, TPUPI dan TPKPIH
- d. Menyusun rencana dan program penyelenggaraan TPI
- e. Melaksanakan penyelenggaraan TPI
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan TPI
- g. Menyusun rencana dan program pengembangan sarana prasarana dan perlindungan nelayan kecil.
- h. Melaksanakan program pengembangan sarana prasarana dan perlindungan nelayan kecil.
- i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan sarana prasarana dan perlindungan nelayan kecil.
- j. Pelaksanaan administrasi Bidang Penangkapan dan Perijinan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan

SEKSI PELAYANAN USAHA

Tugas Pokok :



Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan SIUP, TPUPH dan TPKPIH serta pengelolaan dan penyelenggaraan TPI.

Rincian Tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi penerbitan SIUP, TPUPH dan TPKPIH.
- b. Melaksanakan analisis kebutuhan penerbitan SIUP, TPUPH dan TPKPIH
- c. Melaksanakan penyiapan perumusan penerbitan SIUP, TPUPH dan TPKPIH
- d. Melaksanakan penerbitan SIUP, TPUPH dan TPKPIH
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerbitan SIUP, TPUPH dan TPKPIH
- f. Pelaksanaan administrasi Seksi Perijinan
- g. Melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi pengelolaan TPI.
- h. Melaksanakan analisis kebutuhan pengelolaan TPI.
- i. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan pengelolaan TPI.
- j. Melaksanakan pengelolaan TPI.
- k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan TPI.
- l. Pelaksanaan administrasi Seksi Pengelolaan TPI
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kepala Bidang Penangkapan dan Perijinan

SEKSI SARANA PENANGKAPAN

Tugas Pokok :

Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan sarana penangkapan nelayan.

Rincian Tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi pengembangan sarana prasarana nelayan
- b. Melaksanakan analisis kebutuhan pengembangan sarana prasarana nelayan
- c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan pengembangan sarana prasarana nelayan



- d. Melaksanakan pengembangan sarana prasarana nelayan
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan sarana prasarana nelayan

SEKSI KENELAYANAN

Tugas pokok :

Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengembangan sarana prasarana dan perlindungan nelayan.

Rincian Tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi untuk perlindungan nelayan
- b. Melaksanakan analisis kebutuhan perlindungan nelayan
- c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan perlindungan nelayan
- d. Melaksanakan kegiatan perlindungan nelayan
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perlindungan nelayan
- f. Pelaksanaan administrasi Seksi Kenelayanan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kepala Bidang Penangkapan dan Perijinan

BIDANG BUDIDAYA

Tugas pokok :

Penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan berdasarkan RTRW.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana dan program pengembangan kawasan budidaya, fasilitasi sarana dan prasarana, serta penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan.
- b. Melaksanakan program pengembangan kawasan budidaya, fasilitasi sarana dan prasarana, serta penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan



- c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program pengembangan kawasan budidaya, fasilitasi sarana dan prasarana, serta penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan
- d. Menyusun rencana dan program pengelolaan air dan lahan, kesehatan ikan dan lingkungan, pembinaan mutu pakan dan obat ikan
- e. Melaksanakan program pengelolaan air dan lahan, kesehatan ikan dan lingkungan, pembinaan mutu pakan dan obat ikan
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program pengelolaan air dan lahan, kesehatan ikan dan lingkungan, pembinaan mutu pakan dan obat ikan
- g. Menyusun rencana dan program pembinaan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) dan Cara Pembesaran Ikan Yang Baik (CBIB), penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu dan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan.
- h. Melaksanakan program pembinaan CPIB dan CBIB, penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu dan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan.
- i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan CPIB dan CBIB, penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu dan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan.
- j. Pelaksanaan administrasi Bidang Budidaya
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan

SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN

Tugas pokok :

Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusana dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW, fasilitasi sarana dan prasarana, serta penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan.

Rincian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemeliharaan kawasan budidaya.



- b. Melaksanakan analisis kebutuhan penyusunan rencana pengelolaan dan pemeliharaan kawasan budidaya.
- c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan penyusunan rencana pengelolaan dan pemeliharaan kawasan budidaya.
- d. Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan dan pemeliharaan kawasan budidaya.
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan dan pemeliharaan kawasan budidaya.
- f. Melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi fasilitasi sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.
- g. Melaksanakan analisis kebutuhan fasilitasi sarana dan prasarana pembudidayaan ikan
- h. Melaksanakan kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.
- i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.
- j. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan
- k. Mengolah dan menyajikan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan
- l. Pelaksanaan administrasi Seksi Pengembangan Kawasan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kepala Bidang Budidaya

SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN

Tugas pokok :

Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan.

Rincian tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi untuk pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan.
- b. Melaksanakan analisis kebutuhan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan.
- c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan.



- d. Melaksanakan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan.
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan.
- f. Melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan
- g. Melaksanakan analisis kebutuhan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan
- h. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan
- i. Melaksanakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan
- k. Melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi penggunaan pakan ikan dan obat ikan
- l. Melaksanakan analisis kebutuhan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan
- m. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan
- n. Melaksanakan pembinaan mutu pakan ikan dan ikan
- o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan
- p. Pelaksanaan administrasi Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kepala Bidang Budidaya

SEKSI PERBENIHAN

Tugas pokok :

Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusana dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan CPIB dan CBIB, penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu dan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan

SEKSI PERBENIHAN dalam menyelenggarakan tugas tersebut mempunyai rincian tugas sebagai berikut :



- a. Melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi sasaran pembinaan CPIB dan CBIB
- b. Melaksanakan analisis kebutuhan pembinaan CPIB dan CBIB
- c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan pembinaan CPIB dan CBIB
- d. Melaksanakan pembinaan CPIB dan CBIB
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan CPIB dan CBIB
- f. Melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu untuk BBI, UPR, HSRT dan pembenih skala kecil.
- g. Melaksanakan analisis kebutuhan penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu untuk BBI, UPR, HSRT dan pembenih skala kecil.
- h. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu untuk BBI, UPR, HSRT dan pembenih skala kecil.
- i. Melaksanakan penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu untuk BBI, UPR, HSRT dan pembenih skala kecil.
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu untuk BBI, UPR, HSRT dan pembenih skala kecil.
- k. Melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan
- l. Melaksanakan analisis kebutuhan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan
- m. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan
- n. Melaksanakan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan
- o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan
- p. Pelaksanaan administrasi Seksi Perbenihan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kepala Bidang Budidaya

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Berau Nomor: 70 tahun 2016, tugas pokok dari Dinas Perikanan Kabupaten Berau adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah Kabupaten Berau di bidang perikanan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.



Dalam penyelenggaraan tugas pokoknya di bidang penyelenggaraan perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Berau mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perikanan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang perikanan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan.
- d. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- e. Pelaksanaan UPTD.
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Sumber Daya Aparatur

Dinas Perikanan Kabupaten Berau per 31 Desember 2018 memiliki sumberdaya manusia aparatur sebanyak 62 (enam puluh dua) orang yang terdiri (lima puluh empat) orang PNS dan 8 (delapan) orang Tenaga PTT. Berdasarkan golongan dan pendidikan, sumber daya manusia aparatur dapat diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Jabatan	Golongan				Pendidikan								
	IV	III	II	I	S3	S2	S1	D4	D3	D2	SMA	SMP	SD
Kepala Dinas	0						0						
Sekretaris	1						1						
Kabid	3						3						
Kasubbag		2					2						
Kasubbag TU		5					4				1		
Kasi	1	8				3	5		1				
Ka. UPTD		4						2			2		
Pelaksana		17	12	1		1	13		1		14	0	1
Total	5	36	12	1		4	28	2	2		17	0	1

Tabel 2. Pegawai Tidak Tetap (PTT)

Jabatan	Pendidikan						
	S1	D3	D2	SMA	SMP	SD	Non Pendidikan
Pegawai Tidak Tetap (PTT) Teknis	2			6			
Total	2			6			



Tabel 3. PNS berdasarkan jenjang jabatan

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Pembina Utama	IV/e	0
2	Pembina Utama Madya	IV/d	0
3	Pembina Utama Muda	IV/c	0
4	Pembina Tingkat I	IV/b	1
5	Pembina	IV/a	3
6	Penata Tingkat I	III/d	19
7	Penata	III/c	9
8	Penata Muda Tingkat I	III/b	6
9	Penata Muda	III/a	3
10	Pengatur Tingkat I	II/d	0
11	Pengatur	II/c	4
12	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	3
13	Pengatur Muda	II/a	5
14	Juru Tingkat I	I/d	0
15	Juru	I/c	1
16	Juru Muda Tingkat I	I/b	0
17	Juru Muda	I/a	0
JUMLAH			54

Tabel 5. Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan Kabupaten Berau

NO	Jenis Barang	Jumlah	Keadaan
1	Semak semak	1 buah	baik
2	Kolam Air Tawar	1 buah	baik
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 buah	baik
4	Tanah Bangunan Pembibitan	1 buah	baik
5	Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	2 buah	baik
6	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	1 buah	baik
7	Jeep	2 unit	baik
8	Pick Up	2 unit	baik
9	Kendaraan Bermotor Angkutan Brg Lain lain	1 unit	baik
10	Sepeda Motor	18 unit	baik
11	Gerobak Dorong	30 unit	baik



NO	Jenis Barang	Jumlah	Keadaan
12	Speedboat	1 unit	baik
		3 unit	kurang baik
13	Kapal Penangkap Ikan	2 unit	Baik
14	Mesin Genset	2 unit	Baik
15	Perkakas Bengkel Lain lain	2 buah	Baik
16	Perkakas Khusus Lain lain	13 buah	Baik
17	Global Positioning System	1 buah	Baik
18	Air Conditioning Unit	2 buah	Baik
19	ALat Ukur Lainnya (Lain lain)	1 buah	Baik
20	Timbangan	12 buah	Baik
21	Garpu Besi	10 buah	Baik
22	Alat Panen/Pengolahan Lain lain	5 buah	Baik
23	Alat Pengambil Sample Tanah	1 buah	Baik
24	Alat Processing Lain lain	5 buah	Baik
25	Alat Produksi Perikanan Lain lain	4 buah	Baik
26	Alat Laboratorium Lain lain	3 buah	baik
27	Mesin Ketik Manual Standar (14 16)	4 buah	baik
28	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	10 buah	baik
29	Mesin Ketik Elektronik	6 buah	baik
30	Mesin Ketik Lain lain	1 buah	baik
31	Mesin Hitung Manual	6 buah	baik
32	Mesin Calculator	1 buah	baik
33	Mesin Plate Folio	5 buah	baik
34	Filling besi/Metal	20 buah	baik
35	Brand Kas	2 buah	baik
36	Lemari Arsip	2 buah	baik
37	Papan Pengumuman	6 buah	baik
38	White Board	3 buah	baik
39	Alat Pemotong Kertas	7 buah	baik
40	Overhead Projektor	3 buah	baik
41	Lemari Kayu	22 buah	baik
42	Rak Kayu	2 buah	kurang baik
43	Meja Kayu/Rotan	42 buah	baik
44	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	4 buah	baik
45	Zice	2 buah	baik
46	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	8 buah	baik



NO	Jenis Barang	Jumlah	Keadaan
47	Meja Rapat	10 buah	baik
48	Kursi Rapat	52 buah 10 buah	baik kurang baik
49	Kursi Putar	17 buah	baik
50	Kursi Biasa	9 buah	baik
51	Bangku Tunggu	1 buah	baik
52	Kursi Lipat	1 buah	baik
53	Lemari Pakaian	2 buah	baik
54	Closet Duduk	1 buah	baik
55	Kursi Kerja	6 buah	baik
56	Alat Pengukur Waktu Lain lain	1 buah	baik
57	Mesin Potong Rumput	2 buah	baik
58	AC Split	10 buah	baik
59	Kipas Angin	3 buah	baik
60	Alat Pendingin Lain lain	30 buah	baik
61	Kompor Minyak	1 buah	baik
62	Alat Dapur Lainnya	412 buah	baik
63	Televisi	4 buah	baik
64	Loudspeaker	1 buah	baik
66	Sound System	3 buah	baik
67	Wireless	2 buah	baik
68	Microphone	1 buah	baik
69	Microphone Floor Stand	1 buah	baik
70	Microphone Table Stand	1 buah	baik
71	Stabilisator	1 buah	baik
72	Tustel	6 buah	baik
73	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1 buah	baik
74	Aquarium	3 buah	Kurang baik
75	Tangga Alumunium	1 buah	baik
76	Kaca Hias	3 buah	baik
77	Dispenser	2 buah	baik
78	Mimbar/Podium	1 buah	baik
79	Handy Cam	1 buah	baik
80	PC. Unit	10 buah	Baik
81	Laptop	3 buah 1 buah	baik kurang baik
82	Note book	22 buah	baik



NO	Jenis Barang	Jumlah	Keadaan
		8 buah	kurang baik
83	Hard Disk	8 buah	baik
84	Printer	32 buah	baik
85	Hardisk Eksternal	4 buah	baik
86	Meja Kerja Pejabat Eselon II	3 buah	baik
87	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5 buah	baik
88	Meja Kerja	4 buah	baik
89	Lensa Kamera	1 buah	baik
90	Kompas	1 buah	baik
91	Facsimile	1 buah	baik
92	Senter	1 buah	baik
93	Alat Pengukur Kadar Air	1 buah	baik
94	Freezer	1 buah	baik
95	Kabel Listril	1 buah	baik
96	Lampu Pijar	10 buah	baik
97	ALat Lab. Lingkungan Lain lain	1 buah	baik
98	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6 buah	baik
99	Rehap ringan kantor	1 buah	baik
100	Bangunan Gudang Lain lain	3 buah	baik
101	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1 buah	baik
102	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	1 buah	baik
103	Gedung Pos Jaga Permanen	1 buah	baik
104	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain lain	9 buah	baik
105	Gedung Garasi/Pool Permanen	1 buah	baik
106	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	3 buah	baik
107	Bangunan Gedung Pabrik Lain lain	2 buah	baik
108	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	7 buah	baik
109	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	1 buah	baik
110	Bangunan Tempat Kerja Lain lain	14 buah	baik
111	Rumah Negara Golongan III Lain lain	1 buah	baik
112	Mess/Wisma/Bungalaw/Tempat	2 buah	baik



NO	Jenis Barang	Jumlah	Keadaan
	Peristirahatan Permanen		
113	Lain lain	2 buah	baik
114	Semenisasi	1 buah	baik
115	Jembatan kayu Khusus	1 buah	baik
116	Jembatan Khusus Lain lain	1 buah	baik
117	Pintu Air	2 buah	baik
118	Saluran Drainase	1 buah	baik
119	Bak Penampung/Kolam Ukur	1 buah	baik
120	Instalasi Air Bersih Lain lain	1 buah	baik
121	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Lain lain	1 buah	baik
122	Jaringan Sambungan Kerumah Kapasitas Kecil	1 buah	baik

D. Permasalahan Utama dan Isu-isu Strategis

Permasalahan yang masih dihadapi oleh oleh Dinas Perikanan Kab. Berau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di antaranya:

Belum optimalnya kontribusi sub sektor perikanan terhadap perekonomian daerah

Kabupaten Berau merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumberdaya perikanan untuk kemudian dapat dikembangkan menjadi sektor unggulan. Pengelolaan sumberdaya perikanan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan serta meningkatkan kontribusi ekonomi sub sektor perikanan, terhadap perekonomian daerah. Namun, kontribusi sub sektor perikanan masih minim dibandingkan sektor pertambangan yang masih dominan kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Berau. Sektor pertambangan lambat laun akan mengalami penurunan karena sumber daya alam yang dimanfaatkan akan habis dan tidak dapat diperbarui lagi. Oleh karena itu, dibutuhkan sektor lain yang dapat menggantikan sektor pertambangan dalam menopang perekonomian kabupaten Berau, salah satunya adalah sektor perikanan. Masih minimnya kontribusi sub sektor perikanan terhadap perekonomian daerah disebabkan antara lain oleh belum optimalnya pengelolaan sumberdaya perikanan dan masih rendahnya kapasitas kelembagaan internal perikanan. Diharapkan pengelolaan sumberdaya perikanan Kabupaten Berau dapat lebih optimal setiap tahunnya dan kapasitas kelembagaan internal perikanan dapat



meningkat sehingga kesejahteraan nelayan serta kontribusi sub sektor perikanan terhadap perekonomian daerah dapat lebih meningkat.

Faktor/akar masalah yang menyebabkan belum optimalnya pengelolaan sumberdaya perikanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Masalah, Faktor/Akar Masalah dari Permasalahan Pokok Belum Optimalnya Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap Perekonomian Daerah

No	Masalah	Faktor/Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Pengelolaan Sumberdaya Perikanan	Belum optimalnya upaya peningkatan produksi perikanan
		Terbatasnya sarana penangkapan budidaya ikan
		Rendahnya pengetahuan dan keterampilan penangkapan dan budidaya ikan
		Rendahnya manajemen kelompok pelaku usaha perikanan
2	Rendahnya Kapasitas Kelembagaan Internal Perikanan	Rendahnya kualitas data kelautan dan perikanan
		Rendahnya kualitas manajerial SDM aparatur

Isu strategis pembangunan kelautan dan perikanan yang masih akan dihadapi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Berau, di antaranya berupa:

- 1) Pembangunan perikanan dan kelautan menuntut perlunya dukungan basis data yang benar dan selalu *diupdate*;
- 2) Semakin jauhnya lokasi penangkapan ikan dari garis pantai, sehingga untuk dapat bersaing, nelayan di Kab. Berau dituntut untuk memiliki sarana dan prasarana tangkap yang lebih jauh jangkauannya dan teknologi yang semakin canggih;
- 3) Masih tingginya angka pencurian ikan (*illegal fishing*) dan konflik antar nelayan yang akan berdampak pada tidak optimalnya hasil ikan tangkap;
- 4) Masih tingginya penggunaan sarana tangkap yang tidak ramah lingkungan dan akan berpengaruh pada rusaknya habitat ikan dan keragaman hayati maritim/kelautan;
- 5) Konflik jalur tangkap
- 6) Terbatasnya sapsras pengawasan terkait dengan pengelolaan Sumberdaya Hayati dan Non Hayati Pesisir



- 7) Terbatasnya penyediaan induk dan benih bermutu, pakan murah dan bermutu, kondisi lingkungan budidaya, wabah penyakit serta penggunaan antibiotika dan obat-obatan yang akan berdampak pada budidaya ikan;
- 8) Pengolahan pasca panen yang menuntut industri pengolahan berskala besar dan modern, tingkat sanitasi yang baik, dukungan sarana transportasi, listrik, air bersih, dan *cold storage* yang memadai.
- 9) Belum terciptanya segmentasi usaha perikanan budidaya berdasarkan kapasitas kelembagaan, kemampuan SDM dan permodalan.

E. Maksud, Tujuan dan Manfaat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Berau dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pencapaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Berau dalam pencapaian sasaran strategisnya

2. Tujuan

Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan kepada Bupati Berau selaku pihak yang memberikan amanah dan tugas.

3. Manfaat

- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
- Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan
- Bahan masukan bagi penyempurnaan dokumen rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja pada periode yang akan datang
- Bahan penyempurnaan pengelolaan program dan kegiatan pada periode berikutnya
- Bahan masukan dan pertimbangan pengambilan kebijakan sektor perikanan dan kelautan
- Meningkatkan kualitas perencanaan di segala bidang, baik perencanaan program/kegiatan dan perencanaan penggunaan sumberdaya serta sumber dana



- Memberikan informasi akurat dan obyektif kepada pemberi mandat tentang sejauh mana tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab instansi
- Mendorong instansi pemerintah untuk melakukan peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehingga proses pembangunan sektor perikanan dan kelautan secara luas bisa berlangsung lebih baik, lebih transparan, lebih efisien dan efektif serta lebih dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (lebih akuntabel).

F. Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Perencanaan Kinerja

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Bab IV : Penutup

Lampiran-Lampiran



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsi sebagaimana Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 70 Tahun 2016, Dinas Perikanan Kabupaten Berau mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun, yaitu untuk tahun 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada atau mungkin timbul sebagai pelaksanaan tugas di bidang perikanan.

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 menetapkan perencanaan strategis untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan bagian dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 yang dapat dilihat dalam Tabel sasaran serta target dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai berikut :



TABEL 7. MATRIK RENCANA STRATEGIS
DINAS PERIKANAN TAHUN 2016-2021

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya kontribusi subsektor perikanan terhadap perekonomian daerah	PDRB sektor pertanian	%	5,74	6,04	6,34	6,49	6,52	6,55
	Meningkatnya produksi komoditi perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	2.202,3	2.200,22	2.227,72	2.255,57	2.283,76	2.312,31
		Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	18.000,4	18.216,4	18.380,34	18.545,77	18.712,68	18.881,09
	Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya	Jumlah kelembagaan pelaku utama perikanan yang naik kelas	kelompok			9	9	9	9



A.1 Visi

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Perikanan Kabupaten Berau perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi. meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Perikanan Kabupaten Berau untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan. perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Berau serta sesuai dengan tugas dan Fungsi Dinas Perikanan maka dapat ditentukan bahwa visi Dinas Perikanan Kabupaten Berau megadopsi visi dari RPJMD Kabupaten Berau sebagai berikut :

**MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL DAN
BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA
DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA
BERKELANJUTAN**

Makna dari visi tersebut adalah adanya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten Berau dan seluruh *stakeholder's* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Berau secara komprehensif.

A.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi PD. Rumusan misi PD yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi PD yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh PD bersangkutan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, perlu kiranya dirumuskan misi yang dapat menggerakkan dan mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.



Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Berau adalah misi ke 2 (dua) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau tahun 2016-2021 yaitu :

“ Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal “

A.3. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

A.3.1 Tujuan

Tujuan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Berau ditetapkan selaras dan sejalan dengan tujuan dalam RPJMD Kabupaten Berau yaitu mempertahankan kinerja ekonomi daerah. Tujuan dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Berau. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan. Oleh karena itu guna mewujudkan visi dan misi sebagaimana tersebut di atas maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Berau sebagai berikut :

“Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah”

A.3.2 Sasaran dan Indikator Kinerja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perikanan Kabupaten Berau memiliki sasaran yang hendak dicapai yaitu :

1. Meningkatkan produksi komoditi perikanan

Dalam penentuan sasaran yang hendak dicapai diatas disertai dengan penentuan indikator kinerja sebagai acuan dalam pengukuran kinerja Dinas Perikanan sebagai berikut :

- a. Produksi Perikanan Tangkap
- b. Produksi Perikanan Budidaya



2. Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan dengan indikator :
 1. Jumlah kelembagaan pelaku utama perikanan yang naik kelas

Tabel 8. Tujuan ,Sasaran dan Indikator Kinerja

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
1.	Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah	Meningkatnya produksi komoditas perikanan	1.	Produksi Perikanan Budidaya
		Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan	2.	Produksi Perikanan Tangkap
			1.	Jumlah Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan yang Naik Kelas

A.3.3 Target Indikator Kinerja

Tabel 9. Target Indikator Kinerja Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja	Tahun						IKU
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	2.202,3	2.200,22	2.227,72	2.255,57	2.283,76	2.312,31	√
2	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	18.000,4	18.216,4	18.380,34	18.545,77	18.712,68	18.881,09	√
3	Jumlah Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan yang Naik Kelas (kelompok)			9	9	9	9	

B. Indikator Kinerja Utama



Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Dinas Perikanan Kabupaten Berau menetapkan Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Produksi perikanan tangkap
2. Produksi perikanan budidaya

C. Rencana Kinerja Tahunan 2018

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Berau dapat dilihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahun 2018.

Rencana Kinerja Tahunan 2018 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2018. Rencana Kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2018.

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud



akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2016-2021, Target Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2018 disusun dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Berau tahun 2018 yang dituangkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 10. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
1	Meningkatnya produksi komoditi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	18.380,34 ton
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	2.227,72 ton
2	Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan	Jumlah Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan yang Naik Kelas	9 kelompok

Guna mendukung kelancaran dan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Perikanan maka dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 11. Program dan Pagu Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2018

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
I.	Program Utama		
1.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1.495.450.000	APBD
	- Pengembangan Budidaya Perikanan Air Tawar	369.418.000	APBD
	- Pengembangan Balai Benih Ikan Air Tawar	1.060.416.000	APBD
	- Pengembangan Perbenihan Rakyat	65.616.000	APBD
2.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	2.255.246.000	APBD
	- Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	2.255.246.000	APBD
3.	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	631.275.000	APBD
	- Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	560.715.000	APBD
	- Monitoring Hama dan Penyakit Ikan	70.560.000	APBD



4.	Peningkatan Sarana Prasarana Produksi	1.331.382.000	APBD
	- Peningkatan Produksi dan Sarana Prasarana Perikanan	1.331.382.000	DAK
5.	Penanaman Pohon Pada Lahan di Luar Kawasan	8.500.000.000	DBH DR
	- Penanaman di Kawasan Mangrove	8.500.000.000	DBH-DR
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Perikanan	206.100.000	APBD
	- Pembinaan Kelompok Masyarakat Perikanan	206.100.000	APBD
II.	Program Pendukung		
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.277.680.000	APBD
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	APBD
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	173.500.000	APBD
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	275.000.000	APBD
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	107.671.000	APBD
	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100.000.000	APBD
	- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15.000.000	APBD
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	25.000.000	APBD
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	APBD
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	APBD
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	APBD
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	30.000.000	APBD
	- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	285.000.000	APBD
	- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	70.382.000	APBD
	- Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis	179.627.000	APBD



	Perkantoran		
2.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000	APBD
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	5.000.000	APBD
3.	Program Pengembangan Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan	206.100.000	APBD
	- Konsolidasi Pengembangan Perencanaan Pembangunan Kelautan Perikanan	106.315.000	APBD
	- Penyusunan Data dan Informasi Perikanan	100.500.000	APBD



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2017 oleh Inspektorat Kabupaten Berau menunjukkan kategori **BB** dengan nilai sebesar **79,58** atau interpretasi **sangat baik**, namun terdapat perbaikan yang disarankan atau direkomendasikan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan beserta tindak lanjut atas rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi
Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Kabupaten Berau

No	Rekomendasi	Tindaklanjut
1	Agar Dokumen Renstra yang telah direviu harus diformalkan	Dokumen Renstra yang telah direviu akan diformalkan mengingat Dokumen Renstra Revisi 2016-2021 yang sudah selesai disusun hanya saja masih menunggu penetapan perkara dokumen Renstra karena dokumen RPJMD Revisi sedang dalam tahap penyelesaian akhir
2	Mengumpulkan bukti bahwa pemanfaatan Perencanaan Kinerja yang ditandatangani memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan	Dinas Perikanan belum menerapkan pemberian reward dan punishment terkait pencapaian perencanaan kinerja, namun tahun depan akan diprogramkan pemberian reward kepada bidang-bidang yang telah mencapai target kinerjanya
3	Agar dilakukan monitoring Rencana Aksi Kinerja secara berkala	Rencana Aksi untuk tahun berikutnya akan dilakukan monitoring secara berkala untuk setiap program dan kegiatan terhadap pencapaian target dan jika ada deviasi akan dicari alternatif solusinya
4	Agar pemanfaatan Rencana Aksi memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan	Akan dikoordinasikan ke bidang-bidang terkait program dan kegiatan masing-masing untuk memperhatikan target dalam rencana aksinya sehingga bisa dijadikan acuan untuk memulai pelaksanaan setiap kegiatan
5	Agar menyelaraskan target kinerja dalam perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan	Dalam Dokumen Renstra Revisi Tahun 2016-2021 yang telah disusun yaitu pada Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan serta Cascading Dinas Perikanan telah dilakukan perbaikan



		indikator dan target kinerja dalam upaya menyelaraskan target kinerja atasan dan bawahan
6	Agar keseluruhan ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV dapat diukur	Indikator Kinerja Eselon III dan IV sudah terukur yang bisa dilihat pada Cascading Dinas Perikanan
7	Agar mekanisme pengumpulan data kinerja memenuhi kriteria yang ditetapkan	
	- Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up to date	Sudah dibuat SOP pengumpulan data kinerja
	- Ada kemudahan untuk menelusuri sumberdatanya yang valid	Setiap data akan ditampilkan sumberdata yang valid dan bertanggungjawab terhadap keluarnya data
	- Ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan	Setiap dokumen Perencanaan dan Dokumen Laporan Kinerja sudah diupload melalui websites PemKab. Berau yaitu Portal Kab. Berau sehingga bias diakses oleh pihak pihak yang berkepentingn
	- Terdapat penanggung jawab yang jelas	Setiap dokumen akan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang
	- Jelas waktu deliverynya	Setiap dokumen ditandatangani dan juga dicantumkan tanggal pembuatannya
	- Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data	Akan dibuat SOP Pengumpulan Data Kinerja sampai tahap revisi data
8	Agar IKU unit kerja selaras dengan IKU	
	- IKU Unit Kerja merupakan breakdown dari IKU LPND	IKU Dinas Perikanan sudah merupakan breakdown dari IKU LPND seperti yang tercantum dalam RPJMD Kab. Berau
	- IKU Unit Kerja menjadi penyebab tujuan dan sasaran LPND	IKU Dinas Perikanan yaitu Produksi Perikanan Tangkap dan Produksi Perikanan Budidaya adalah penyebab meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian yang merupakan sasaran LPND
9	Agar dalam menetapkan ukuran (indikator) kinerja eselon III dan IV harus memenuhi kriteria yang	Indikator Kinerja Eselon III dan IV sudah menggambarkan hasil sesuai dengan levelnya dan terkait langsung dengan kondisi yang akan diukur



	ditetapkan	
10	Agar indikator kinerja eselon III dan IV merupakan breakdown dari indikator atasan	Dalam Dokumen Renstra Revisi 2016-2021 dan Cascading Dinas Perikanan juga Rencana Aksi sudah dilakukan perbaikan indicator kinerja Eselon III dan IV
11	Agar indikator kinerja eselon III dan IV menjadi penyebab terwujudnya kinerja atasan	Dalam Dokumen Renstra Revisi 2016-2021 dan Cascading Dinas Perikanan juga Rencana Aksi sudah dilakukan perbaikan indicator kinerja Eselon III dan IV
12	Agar IKU individu merupakan breakdown dari IKU atasan	Dinas perikanan sudah menyusun IKU individu yang merupakan breakdown dari IKU atasan sesuai Surat Edaran Bupati Nomor 065/39/Org tanggal 27 Desember 2017 Perihal Penyampaian Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja 2018 yang didalamnya terdapat kewajiban untuk membuat Indikator Kinerja Individu
13	Agar IKU individu menjadi penyebab terwujudnya kinerja utama atasannya	Dinas perikanan sudah menyusun IKU individu yang merupakan breakdown dari IKU atasan sesuai Surat Edaran Bupati Nomor 065/39/Org tanggal 27 Desember 2017 Perihal Penyampaian Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja 2018 yang didalamnya terdapat kewajiban untuk membuat Indikator Kinerja Individu
14	Melakukan pengukuran berjenjang	Akan dilakukan pengukuran berjenjang dari pimpinan sampai dengan staf
15	Agar data capaian kinerja yang dihasilkan memenuhi kriteria yang andal	Melalui rapat penyusunan Laporan Kinerja oleh Tim Penyusun Lakip maka telah disepakati untuk menyampaikan data capaian kinerja yang berdasarkan fakta sebenarnya, terstruktur dan pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya
16	Seluruh target yang ada dalam Rencana Aksi diukur realisasinya secara berkala	Tahun 2018 telah dilakukan pengukuran target Rencana Aksi secara berkala yaitu per triwulan
17	Membuat reward dan punishment untuk seluruh jabatan setingkat eselon IV ke atas yang sebanding dengan hasil pengukuran capaian kerjanya	Tahun 2018 Kepala Dinas Perikanan telah memberikan reward berupa penilaian prestasi kerja dengan nilai minimal baik pada pegawai yang berkinerja baik. Selanjutnya tahun depan akan diprogramkan pemberian reward berupa sertifikat oleh Kepala Dinas kepada pegawai yang berkinerja baik, sementara pemberian punishment telah dilaksanakan



		dengan menerapkan Peraturan Bupati Berau Nomor 22 tahun 2018 tentang pelaksanaan hari kerja, apel pagi, presensi sidik jari dan daftar hadir bagi ASN dalam rangka penegakan kedisiplinan dan peningkatan kinerja pegawai
18	Merevisi IKU	IKU akan direvisi secara berkala dan diformalkan
19	Agar dalam laporan kinerja menyajikan informasi sasaran yang berorientasi outcome	Pada Laporan Kinerja tahun 2018 akan disajikan informasi sasaran yang berorientasi outcome
20	Menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja	Pada Laporan Kinerja tahun 2018 akan diuraikan hasil evaluasi dan analisis tentang capaian kinerja outcome
21	Menyajikan laporan kinerja dengan membandingkan realisasi dengan standar nasional	Pada Laporan Kinerja tahun 2018 akan disajikan perbandingan dengan standar nasional (jika ada)
22	Menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dan besaran efisiensi tersebut dapat dikuantifikasikan	Pada Laporan Kinerja tahun 2018 akan diuraikan analisis efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dikuantifikasikan
23	Menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan seluruh pencapaian sasaran (outcome)	Pada Laporan Kinerja tahun 2018 akan disajikan informasi keuangan yang terkait dengan seluruh pencapaian sasaran (outcome)
24	Memanfaatkan informasi kinerja yang dicapai untuk perbaikan perencanaan yang ekstensif dan menyeluruh	Capaian kinerja tahun lalu dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan masing masing bidang.
25	Memanfaatkan informasi kinerja yang digunakan untuk perbaikan capaian kinerja yang lebih baik periode berikutnya	Capaian Kinerja tahun lalu akan dijadikan acuan dalam perbaikan capaian kinerja periode berikutnya melalui berbagai program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja



26	Agar dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi	Akan dilakukan monitoring pelaksanaan Rencana Aksi dengan membuat Form Monitoring Rencana Aksi sehingga memudahkan dalam pengukuran target dan identifikasi masalah
27	Hasil evaluasi harus disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk tindak lanjut hasil evaluasi	Telah dilaksanakan rapat internal dengan bidang-bidang yang bertanggung jawab terhadap pencapaian sasaran kinerja, program dan kegiatan sehingga dengan hasil evaluasi ini diharapkan akan ada perbaikan dalam pencapaian kinerja pada tahun berikutnya
28	Meningkatkan informasi capaian output di tahun depan yang memenuhi kriteria	Bidang Budidaya, Bidang Penangkapan dan Pelayanan Usaha serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Perikanan telah berupaya semaksimal mungkin dengan berbagai program kegiatan untuk meningkatkan capaian output di tahun depan
29	Meningkatkan realisasi capaian kinerja yang dilaporkan (outcome) untuk pencapaian kinerja tahun berjalan melebihi capaian tahun sebelumnya	Melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Perikanan yang kelompok sasarannya adalah nelayan dan pembudidaya ikan akan diupayakan semaksimal mungkin agar target bisa tercapai dan bisa melampaui capaian tahun sebelumnya

3.2. Capaian Kinerja Organisasi

3.2.1. Pengukuran Kinerja

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.



Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

95 s/d 100 : Sangat Berhasil

85 s/d <95 : Berhasil

50 s/d <85 : Cukup Berhasil

0 s/d <50 : Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.

Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

Pada tahun 2018 terdapat 2 sasaran kinerja dengan 3 indikator kinerja. Adapun uraian realisasi tiap indikator dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 13. Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	%
1	Meningkatnya produksi komoditi perikanan	Capaian Sasaran ke -1			102,63
		Jumlah produksi perikanan tangkap	13.380,34 ton	13.380,50 ton	100,00
		Jumlah produksi perikanan budidaya	2.227,72 ton	2.344,65 ton	105,25



2	Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan	Capaian Sasaran ke -2			88.89
		Jumlah kelembagaan pelaku utama perikanan yang naik kelas	9 kelompok	8 kelompok	88.89

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja Dinas Perikanan maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap pencapaian kinerja, sejauhmana keberhasilan yang telah dicapai dan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat peningkatan kinerja Dinas Perikanan. Evaluasi dilakukan terhadap hasil pengukuran target kinerja yang telah dilakukan.

Berdasarkan table 13. Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2018 bisa diukur tingkat capaian (predikat) kinerja Sasaran Dinas Perikanan pada tahun 2018 seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 14. Tingkat Capaian (Predikat) Kinerja Sasaran Dinas Perikanan Tahun 2018

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Skala Pengukuran Ordinal			
			Sangat Berhasil 95 s.d 100	Berhasil 85 sd <95	Cukup Berhasil 50 s.d 85	Kurang Berhasil 0 s.d 50
1	Meningkatnya produksi komoditas perikanan	102,63	Sangat Berhasil			
2	Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan	88,89		Berhasil		

Berikut akan diuraikan evaluasi dan analisa per sasaran Dinas Perikanan Tahun 2018 mengenai perbandingan capaian indikator kinerja terhadap target tahun 2018 , perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya, perbandingan dengan target yang ada dalam Renstra dan perbandingan dengan target nasional.

1. Sasaran : Meningkatkan Produksi Komoditi Perikanan

1.1. Perbandingan capaian indikator kinerja sasaran terhadap target 2018



Tabel 15. Perbandingan capaian indikator sasaran kinerja terhadap target 2018

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	%
1	Jumlah produksi perikanan tangkap	18.380,34 ton	18.380,50 ton	100
2	Jumlah produksi perikanan budidaya	2.227,72 ton	2.344.65 ton	105,25
Rata-rata capaian sasaran				102.63

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran ke-1 Dinas Perikanan memperoleh nilai diantara 95 sd. 100 dengan predikat **Sangat Berhasil**. Berikut akan diuraikan masing-masing indikator kinerja sasaran di atas :

a. Indikator Kinerja Sasaran : Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target produksi perikanan tangkap tahun 2018 berhasil dicapai dengan persentase keberhasilan 100%. Jumlah produksi perikanan tangkap merupakan hasil perhitungan gabungan dari volume produksi yang didaratkan perusahaan perikanan atau pengumpul ikan, pelabuhan perikanan dan hasil estimasi di desa sampel yakni desa perikanan yang terpilih sebagai desa untuk dilakukan pengumpulan/pendataan statistic perikanan tangkap dengan metodologi sampling. Komoditi ikan yang ditangkap di laut yang diambil data produksinya adalah sebanyak 55 jenis ikan, sedangkan komoditi ikan yang ditangkap di perairan umum yang diambil data produksinya adalah sebanyak 10 jenis ikan. Berikut tabel produksi perikanan tangkap dari sub sektor perikanan laut dan perairan umum per triwulan dan per jenis ikan :

Tabel 16. Capaian Produksi dari Sub Sektor Perikanan Tangkap Per Triwulan Tahun 2018

Sub Sektor Perikanan tangkap	Produksi Tahun 2018 (ton)				
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Total
Perikanan Laut	3.253,0	5.0001,3	4.640,0	4.212,9	17.107,20
Perairan Umum	258,9	362,1	339,7	312,6	1.273,30
TOTAL PRODUKSI					18.380,50

Sumber Data : Bidang Penangkapan dan Pelayanan Usaha tahun sampai dengan triwulan IV



Tabel 17. Capaian produksi per jenis ikan dari sub sektor perikanan laut tahun 2018

No	Jenis Ikan	PRODUKSI TAHUN 2018				TOTAL
		TRIWULAN II	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3	TRIWULAN 4	
1	2	4	6	8	10	12
1	<i>Manyung</i>	81.6	117.4	89.3	74.0	362.3
2	Sebelah	8.4	9.6	8.4	10.0	36.4
3	<i>Ekor Kuning</i>	45.0	63.7	44.9	37.9	191.5
4	<i>Selar</i>	80.6	130.2	111.2	98.7	420.7
5	<i>Kuwe</i>	139.2	223.1	209.2	162.9	734.4
6	Layang	136.5	232.1	194.5	174.7	737.8
7	Sunglir	9.2	14.4	15.4	15.1	54.1
8	Tetengkek	6.6	9.2	11.2	10.9	37.9
9	Bawal Hitam	89.0	138.7	127.1	113.8	468.6
10	Bawal Putih	96.5	136.3	77.5	95.4	405.7
11	<i>Talang-Talang</i>	31.9	82.7	90.2	83.6	288.4
12	<i>Bentong</i>	36.0	58.1	60.5	51.1	205.7
13	<i>Kakap</i>	76.1	112.2	136.2	124.0	448.5
14	Golok-golok (x)	5.3	15.3	17.6	11.9	50.1
15	Selanget	62.6	133.3	131.3	119.5	446.7
16	Japuh	4.8	15.9	25.4	23.3	69.4
17	<i>Tembang</i>	60.4	116.8	129.0	119.2	425.4
18	Tuna	4.3	14.9	17.6	17.6	54.4
19	Lidah	3.0	4.2	6.7	7.5	21.4
20	<i>Teri</i>	149.1	276.3	244.8	222.6	892.8
21	Gerot - gerot	22.6	30.7	31.2	27.5	112.0
22	Terubuk	6.0	5.6	3.0	2.9	17.5
23	Kapas-kapas	9.4	14.7	15.1	21.0	60.2
24	Peperek	8.8	15.5	13.6	13.2	51.1
25	<i>M. Bambang</i>	59.4	104.8	126.3	116.2	406.7
26	<i>Belanak</i>	76.7	132.4	126.9	115.6	451.6
27	<i>Biji Nangka</i>	56.5	125.9	121.4	111.3	415.1
28	Kurisi	31.0	53.3	54.5	51.9	190.7
29	<i>Kuro/Senangin</i>	88.3	122.1	124.1	108.3	442.8
30	<i>Swanggi /Mata Bsr</i>	18.2	36.8	37.5	33.7	126.2
31	<i>Gulamah</i>	69.1	92.8	93.8	87.4	343.1
32	Tongkol krai	129.0	235.9	210.3	195.4	770.6
33	Tongkol komo	170.6	273.7	243.6	220.5	908.4
34	Cakalang	101.7	143.2	129.7	120.5	495.1
35	<i>Kembung</i>	166.3	256.2	261.9	230.1	914.5
36	<i>Tenggiri</i>	116.7	219.5	213.8	195.6	745.6
37	Kerapu karang	0.3	3.4	1.8	2.3	7.8
38	Kerapu bebek	0.9	3.6	2.4	2.4	9.3
39	Kerapu balong	0.7	3.7	3.0	2.1	9.5
40	Kerapu sunu	0.8	3.1	2.7	3.1	9.7
41	Baronang	51.7	45.5	61.4	56.7	215.3
42	Manggilala/Pucul/Alu2	46.7	66.3	61.0	56.4	230.4
43	<i>Cucut</i>	33.8	71.6	60.1	56.5	222.0
44	<i>Pari</i>	87.4	95.3	104.0	96.0	382.7



45	Udang Dogol	175.8	241.6	182.7	165.7	765.8
46	Udang Putih	223.0	268.3	224.3	202.7	918.3
47	Udang Windu	93.3	87.3	73.3	66.4	320.3
48	Udang Barong	5.3	21.6	19.7	18.0	64.6
49	Kepiting	67.9	52.6	49.7	45.2	215.4
50	Rajungan	77.8	95.7	65.4	65.4	304.3
51	Teripang	22.6	25.1	27.3	24.5	99.5
52	Kerang Dara	29.0	13.7	16.3	15.2	74.2
53	Cumi - cumi	45.7	80.6	80.9	68.9	276.1
54	Gurita	11.9	10.7	10.3	9.5	42.4
55	Sotong	22.0	44.1	39.0	31.1	136.2
	Jumlah	3,253.0	5,001.3	4,640.0	4,212.9	17,107.2

Sumber Data : Bidang Penangkapan dan Pelayanan Usaha sampai triwulan IV tahun 2018

Tabel 18. Capaian produksi per jenis ikan dari sub sektor penangkapan perairan umum tahun 2018

No	Jenis Ikan	PRODUKSI TAHUN 2018				
		TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3	TRIWULAN 4	TOTAL
1	2	4	6	8	10	12
1	Salab	22.1	27.3	26.4	26.8	102.6
2	Jambal/Patin	31.0	39.7	35.9	33.7	140.3
3	Gabus	20.2	27.6	27.0	26.1	100.9
4	Lais	15.0	22.6	21.2	23.1	81.9
5	Baung	14.5	21.7	21.0	23.1	80.3
6	Ikan Lainnya	54.5	77.2	89.4	71.6	292.7
7	Udang Galah	54.5	70.4	61.8	56.2	242.9
8	Udang Tawar	43.4	67.4	51.5	47.9	210.2
9	Udang Grago	3.7	8.2	5.5	4.1	21.5
10	Udang Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah	258.9	362.1	339.7	312.6	1,273.3

Sumber Data : Bidang Penangkapan dan Pelayanan Usaha sampai triwulan IV tahun 2018

b. Indikator Kinerja : Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Berdasarkan tabel 15 di atas dapat dilihat bahwa target produksi perikanan budidaya tahun 2018 berhasil dicapai bahkan terlampaui dengan persentase keberhasilan 105,25 %. Jumlah produksi perikanan budidaya merupakan hasil perhitungan gabungan dari volume produksi yang dihasilkan oleh budidaya tambak, kolam, keramba dan budidaya pantai/laut selama tahun 2018 dengan komoditas yang berbeda sesuai jenis usaha budidayanya. Berikut tabel produksi perikanan budidaya tahun 2018 per triwulan dan per jenis ikan :



Tabel 19. Capaian Produksi dari Sub Sektor Perikanan Budidaya Tahun 2018

Sub Sektor Perikanan Budidaya	Produksi Tahun 2018 (ton)				
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Total
Budidaya Payau/tambak	483	493,2	443,2	423,7	1.843,1
Budidaya Kolam	85,8	85,4	85	84,3	340,50
Budidaya Keramba	6,10	4,74	4,65	9,46	24,95
Budidaya Keramba/Jaring Apung	30,80	39,75	31,1	34,4	136,1
TOTAL PRODUKSI					2.344,65

Sumber Data : Bidang Budidaya tahun sampai dengan triwulan IV

Tabel 20. Capaian produksi per jenis ikan dari sub sektor perikanan budidaya tahun 2018

NO	KOMODITAS	TARGET (ton)	PRODUKSI (ton)
1	Bandeng	870.3	867
2	Udang Windu	720.9	720.3
3	Udang Bintik	92.8	92.8
4	Udang Vaname	64.7	163
TOTAL PRODUKSI TAMBAK		1,748.70	1,843.10
1	Kerapu	101	116.2
2	Rumput Laut	0	0
3	Lobster	20	19.9
TOTAL PRODUKSI BUD. LAUT		121	136.1
1	Udang Galah	0.42	0
2	Mas	56.5	60
3	Nila	141.5	145.6
4	Lele	88.9	88
5	Patin	70.7	71.85
TOTAL PRODUKSI AIR TAWAR		358.02	365.45
TOTAL PRODUKSI		2,227.72	2,344.65

Sumberdata : bidang budidaya tahun 2018



1.2. Perbandingan capaian kinerja dengan capaian tahun-tahun sebelumnya

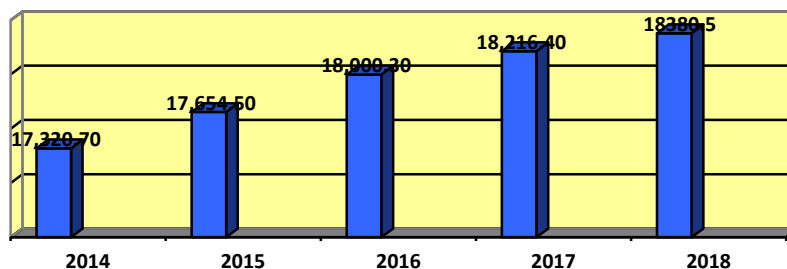
Tabel 21. Perbandingan capaian kinerja tahun 2018 dengan empat tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	17,320.70	17,654.50	18,000.30	18,216.40	18,380.50
2	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	1,594.1	1,866.2	2,202.3	2,200.22	2,344.65

a. Indikator Kinerja Sasaran: Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Jika digambarkan dengan menggunakan grafik maka data jumlah produksi perikanan selama 5 tahun berturut-turut akan tampak sebagai berikut :

GRAFIK 1. PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP (ton)

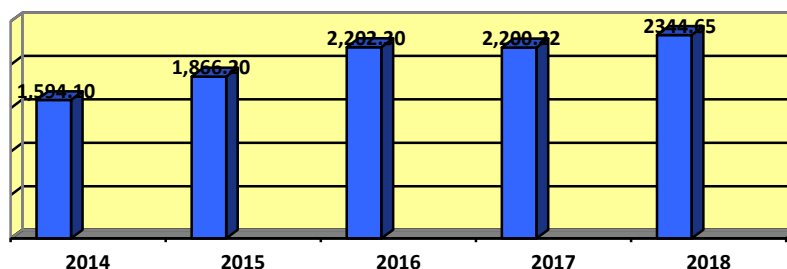


Grafik di atas menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 1,5 % atau sekitar 265 ton per tahun.

b. Indikator Kinerja Sasaran: Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Jika digambarkan dengan menggunakan grafik maka data jumlah produksi perikanan selama 5 tahun berturut-turut akan tampak sebagai berikut :

Grafik 2. Produksi Perikanan Budidaya





Grafik di atas menunjukkan bahwa produksi perikanan budidaya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 terus mengalami peningkatan yang signifikan namun tahun 2017 mengalami sedikit penurunan sekitar 2.08 ton dikarenakan target produksi budidaya masih bertumpu pada budidaya rumput laut basah, sementara budidaya rumput laut tahun 2017 mengalami penurunan produksi yang sangat signifikan dan juga adanya serangan hama penyakit ikan pada sentra budidaya seperti yang menyerang di Kampung Maratua yaitu pada budidaya kerapu dan virus KHV pada budidaya keramba dan kolam di Kel. Gunung Tabur.

Namun di tahun 2018, produksi budidaya kembali mengalami peningkatan sebesar 144.43 ton dari tahun sebelumnya sehingga target 2018 bisa terlampaui.

1.3 Perbandingan capaian kinerja tahun 2018 dengan target dalam Renstra

Untuk mengetahui pencapaian kinerja tahun ini dan target di tahun berikutnya sebagai upaya untuk mengontrol kinerja Dinas Perikanan dalam mendukung sasaran Pemerintah Kabupaten Berau yang tertuang dalam RPJMD Kab. Berau, maka perlu disajikan data pencapaian kinerja tahun yang sedang dievaluasi dengan target yang ada dalam Renstra (Rencana Srtategis) Dinas Perikanan. Berikut data yang dimaksud :

Tabel 22. Perbandingan target dan realisasi tahun 2018 dengan target dalam Renstra

No	Indikator Kinerja	2018			Target dalam Renstra		
		satuan	Target	Realisasi	2019	2020	2021
1	Produksi Perikanan Tangkap	ton	18,380.34	18,380.50	18,545.77	18,712.68	18,881.09
2	Produksi Perikanan Budidaya	ton	2,227.72	2,344.65	2,255.57	2,283.76	2,312.31

1.4 Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2018 dengan standar nasional

Tabel 23. Perbandingan capaian kinerja tahun 2018 dengan target nasional

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2018	Target Nasional Tahun 2018	% terhadap Nasional
Produksi Perikanan Tangkap (ton)	13.830,34	9,45 juta	0,19 %
Produksi Perikanan Budidaya (ton)	2.344,65	24,08 juta	0,01 %



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa produksi perikanan di Kabupaten Berau berkontribusi sebesar 0,19 % terhadap target produksi perikanan tangkap nasional dan 0,01 % terhadap target produksi perikanan budidaya nasional.

1.5. Analisis keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan alternative solusi yang telah dilakukan

Dari tabel 15 yang telah disajikan sebelumnya terlihat bahwa sasaran ke -1 Dinas Perikanan dengan dua indicator kinerja berhasil dicapai dengan prosentase rata-rata 102.63 %. Berikut analisa masing-masing indicator kinerja :

a. Indikator kinerja sasaran : Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Target produksi perikanan tangkap tahun 2018 sebesar 18,380.34 ton berhasil dicapai oleh Dinas Perikanan dengan capaian 18,380.50 ton atau sebesar 100 %. Faktor penyebab keberhasilan atau pencapaian target kinerja tersebut adalah :

- Adanya kemudahan dan percepatan pelayanan perijinan khususnya bagi nelayan kecil, sehingga nelayan mendapatkan kemudahan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan
- Pendistribusian bahan bakar minyak khususnya nelayan yang lebih baik sehingga nelayan lebih mudah mendapatkan bahan bakar minyak subsidi yang membantu menekan biaya operasional kegiatan penangkapan ikan sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan. Pada tahun 2018 ini Dinas Perikanan melalui Bidang Penangkapan dan Pelayanan Usaha telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Kapal Nelayan sebanyak 3042 unit kapal untuk membeli BBM bersubsidi di SPBN PPI Sambaliung dimana SPBN ini khusus melayani kebutuhan BBM bagi nelayan yang telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perikanan.
- Adanya pembatasan nelayan andon/nelayan pendatang sehingga nelayan lokal lebih leluasa dalam melakukan penangkapan ikan
- Adanya kegairahan nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan yang merupakan dampak dari Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan bantuan sarana penangkapan ikan seperti alat tangkap, mesin ketinting dan mesin dongfeng serta perlindungan kepada nelayan kecil berupa asuransi nelayan sehingga terutama nelayan kecil bisa terus melaut dengan rasa aman. Dalam upaya untuk mencapai sasaran Dinas Perikanan yaitu meningkatnya produksi komoditi perikanan



maka selama tahun 2018 melalui Bidang Penangkapan dan Pelayanan Usaha telah diberikan bantuan berupa sarana penangkapan ikan nelayan atau KUB yang ada di beberapa kampung di Kabupaten Berau sebagai stimulant bagi mereka dalam melakukan operasi penangkapan ikan baik di laut maupun perairan umum darat . Berikut tabel paket bantuan tahun 2018 yang diserahkan kepada masyarakat perikanan dalam hal ini kelompok nelayan :

Tabel 24. Data Paket Bantuan kepada kelompok nelayan tahun 2018

No	Paket Bantuan	Kampung/ Kec.	Nama Kelompok	Jumlah Paket (unit/piece)	Ket
1	Pengadaan mesin ketinting 13 PK Lengkap	Pilanjau (Sambaliung)	Cahaya Mantaritip 89	10 unit	APBD II
2	Pengadaan mesin ketinting 5 PK lengkap	Batu Putih (Batu Putih)	Mak Kase	15 unit	APBD II
3	Pengadaan mesin ketinting 10 PK Lengkap	Karang Ambon (Tg.Redeb)	Makmur Sejahtera	11 unit	APBD II
4	Pengadaan jaring millennium lengkap	Kel.Gayam (Tg. Redeb)	Selangat Jaya	63 set	APBD II
5	Pengadaan mesin diesel dafeng 24 PK lengkap	Kasai (Pl. Derawan)	Mitra Nelayan	10	APBD II
6	Pengadaan Jaring Purse Seine lengkap	Sambaliung (Sambaliung)	Koperasi Mina Harapan Nelayan	2,5 ' (30 kg) 1' (3 piece) 2' (27 piece)	APBD II
7	Pengadaan Waring/Dari	Batu Putih (Batu Putih)	Mak Kase	25 gulung (hitam)	APBD II
8	Pengadaan Jaring	Kel.Tl.Bayur	Ramah Mandiri	120 set	DAK



	Insang Lengkap	(Tl.Bayur)			
9	Pengadaan Jaring Insang Lengkap	Batu Putih (Batu Putih)	Daing Banak	82 set	DAK
10	Pengadaan Jaring Insang Lengkap	Batu Putih (Batu Putih)	Mak Kase	93 set	DAK
11	Pengadaan Jaring Insang Lengkap	Batu Putih (Batu Putih)	Tanjung Buaya Buaya	82 set	DAK
12	Pengadaan Jaring Insang Lengkap	Pilanjau (Sambaliung)	Teratai Putih	63 set	DAK
13	Pengadaan Jaring Insang Lengkap	Pilanjau (Sambaliung)	Sipatonggeng	60 set	DAK
14	Pengadaan Waring/Dari	Batu Putih (Batu Putih)	Tanjung Buaya Buaya	50 gulung (biru)	DAK
15	Jaring Milenium	Pesayan (Sambaliung)	Bebassai	60 set	DAK
16	Bubu	Teluk Bayur (Teluk Bayur)	Ramah Mandiri	600 unit	DAK
17	Rawai	Teluk Bayur (Teluk Bayur)	Ramah Mandiri	72 unit	DAK
18	Pengadaan Fish Finder	Giring-Giring (Biduk-Biduk)	Sehati	10 unit	DAK
19	Pengadaan Fish Finder	Talisayan (Talisayan)	Talisayan Lestari (04)	7 unit	DAK
20	Pengadaan Fish Finder	Talisayan (Talisayan)	Talisayan Lestari (05)	8 unit	DAK
21	Jaring Insang, Bahan Bubu, Mata Pancing	Labanan Jaya (Teluk Bayur)	Segah Mandiri		APBD-P
22	Jaring insang dan	Tubaan	Tubaan Lestari		APBD-P



	trammel net	(Tabalar)			
23	Jaring Trammel Net	Tabalar Muara (Tabalar)	Sumber Rezeki	130 set	APBD-P

Sumber Data : Bidang Penangkapan dan Pelayanan Usaha, Seksi Sarana Penangkapan, desember 2018

Meskipun secara umum target produksi perikanan tangkap tercapai namun khusus untuk penangkapan di perairan umum darat (PUD) terdapat beberapa kendala dalam pencapaian targetnya yaitu sebagai berikut :

- Masih adanya penangkapan dan pengangkutan ikan yang belum dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Berau.
- Tingginya lalu lintas kapal non perikanan yang kerap bersinggungan nelayan yang melakukan penangkapan ikan khususnya di perairan umum sehingga banyak alat tangkap ikan nelayan yang mengalami kerusakan atau hilang
- Perubahan kualitas sumberdaya perairan umum akibat maraknya pembukaan lahan di daratan yang mengalirkan limbah dan sedimentasi ke perairan

Dari berbagai permasalahan diatas maka solusi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perikanan untuk meningkatkan capaian produksi tahun selanjutnya adalah :

1. Penerapan sistem Surat Keterangan asal ikan dalam pengiriman ikan ke luar kabupaten berau
2. Penerapan sistem pencatatan kapal perikanan khususnya nelayan kecil
3. Penerapan sistem rekomendasi BBM nelayan dan pelaporan hasil penangkapan ikan
4. Mediasi dan fasilitasi terhadap konflik nelayan perusahaan akibat terganggunya kegiatan penangkapan ikan nelayan kecil di perairan umum
5. Sosialisasi kegiatan wilayah penangkapan nelayan kecil ke beberapa pihak terkait pengguna perairan umum
6. Melakukan pemeriksaan air ketika terjadi gejala perubahan air yang di duga akibat dari pencemaran limbah
7. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait pada saat di temukan indikasi pencemaran perairan akibat kegiatan industri
8. Menginventarisasi kegiatan penampungan ikan dan pendataan produksi perikanan yang didaratkan di penampungan ikan



9. Menginventarisasi harga ikan pada tingkat nelayan., penampung dan pedagang langsung.

Hal-hal tersebut di atas telah dilakukan oleh Dinas Perikanan melalui Bidang Penangkapan dan Pelayanan Usaha dalam upaya untuk mencapai target produksi tahun selanjutnya sebagai indikator kinerja Dinas Perikanan.

b. Indikator kinerja sasaran : Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Target produksi perikanan budidaya tahun 2018 sebesar 2,227.72 ton berhasil dicapai oleh Dinas Perikanan bahkan bisa melampaui target yakni sebesar 2,344.65 ton atau sebesar 105.25 % Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut adalah :

- Telah adanya penunjukan kawasan perikanan yang terintegrasi dengan kegiatan lainnya melalui Surat Penunjukan Kawasan Mina Bestari (Kawasan Perikanan Berdaya Saing dan Lestari) yang memberikan ruang pemanfaatan terhadap kegiatan budidaya baik dari sisi potensi pengembangan maupun aspek pendukung lainnya.
- Pemberian paket bantuan sapsras perikanan secara simultan untuk pokdakan/masyarakat melalui program pengembangan budidaya perikanan dan pengembangan kawasan budidaya laut, air tawar dan payau
- Penerapan teknologi anjuran (tepat guna) berupa dempond budidaya di sentra-sentra kawasan budidaya
- Melakukan kegiatan monitoring hama dan penyakit ikan yang terpadu dengan Tim Dinas Perikanan Provinsi Kaltim, Balai Karantina Balikpapan untuk kegiatan pengendalian hama dan penyakit ikan di sentra-sentra kawasan budidaya dalam rangka peningkatan produksi perikanan.
- Telah terjalin hubungan kerjasama yang baik dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) melalui Balai Pengelolaan Wilayah Sungai Kalimantan III dalam kegiatan pembuatan jaringan tata air tambak dan peninggian tanggul di sentra-sentra kawasan perikanan budidaya (Tabalar Muara, Sepetak dan Suaran)
- Pemberian paket bantuan yang menyentuh langsung dengan peningkatan produksi perikanan seperti mesin pakan, dimana diharapkan akan terciptanya pakan dengan kualitas yang baik dengan harga lebih terjangkau sehingga pembudidaya atau masyarakat dapat meningkatkan produksi budidaya



- Kinerja UPR dan BBI dalam rangka menghasilkan benih unggul yang memiliki kualitas baik sudah dirasakan oleh masyarakat pembudidaya
- Adanya asosiasi yang merupakan wadah urun rembug bagi pembudidaya, pembenih dan pengolah dalam rangka peningkatan produksi dan ekonomi
- Pangsa pasar untuk komoditi perikanan budidaya telah terbentuk baik ditingkat pengumpul dikampung maupun di kabupaten sehingga harga jual komoditi perikanan budidaya mendapat harga yang baik
- Adanya penerapan SOP dan CBIB yang telah termuat dalam Perbup Perikanan Budidaya No. 44 tahun 2017.
- Keberhasilan Penyuluh Perikanan, UPTD dan stakeholder terkait dalam mensosialisasikan teknologi aplikatif perikanan budidaya dalam rangka peningkatan produksi
- Penerapan dan sosialisasi inovasi SIAP SEDIA dalam rangka mendukung program SANG RATU (Standarisasi Perikanan Budidaya Menuju Marine Culture) telah teraplikasi cukup baik di pembudidaya/masyarakat perikanan di sentra kawasan budidaya

Meskipun secara umum target produksi perikanan budidaya tercapai bahkan melampaui target namun masih terdapat kendala dalam usaha mencapai target tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Kegiatan Budidaya khususnya perikanan air tawar masih dijadikan usaha sambilan sehingga banyak pembudidaya yang telah menekuni kegiatan usaha budidaya beralih ke usaha lain yang lebih menjanjikan
- b. Serangan penyakit dan hama pada sentra budidaya tawar, laut dan payau ditemui di beberapa sentra budidaya. Penyakit yang menyerang antara lain virus dan bakteri. Untuk budidaya laut bakteri yang menyerang adalah jenis bakteri vibrio di temukan di pemeliharaan budidaya laut / kerapu di Kampung Maratua kematian mencapai 70 %, penyakit virus ditemui pada kegiatan budidaya payau/ tambak di Kampung Betumbuk Dan Tabalar, selain itu juga ditemui virus KHV pada budidaya karamba dan kolam di Kampung Gunung Tabur.
- c. Tanggul tambak terlalu rendah pada budidaya payau, sehingga banyak tambak yang tidak berfungsi akibat pada saat pasang tertinggi terendam air laut. Di Kampung



Mantaritip (Saketa) sekitar 200 Ha, Kampung Tabalar sekitar 725 ha. Kampung Buyung – Buyung sekitar 50 Ha. Seketa dan Suaran).

- d. SR benih ikan yang terlalu rendah pada pemeliharaan budidaya ikan air tawar hal ini disebabkan banyaknya pembudidaya pemula yang belum mengetahui secara teknis untuk awal kegiatan budidaya.
- e. Masih rendahnya produksi balai benih ikan air tawar untuk dapat mencukupi permintaan benih ikan air tawar. Hal ini disebabkan kurang optimalnya peran UPR untuk menghasilkan benih.
- f. Belum kontinuitasnya produksi udang windu di BBIP untuk menyuplai kegiatan budidaya tambak secara rutin. Hal ini disebabkan keterbatasan listrik sebagai pemasok operasional balai.

Solusi yang telah diupayakan oleh Dinas Perikanan melalui Bidang Budidaya agar tahun selanjutnya tetap bisa meningkatkan produksi adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan kerjasama dengan PT. Berau Coal dalam mengadakan pelatihan, seminar dan magang dalam rangka peningkatan wawasan bagi pembudidaya ikan
- b. Telah dilakukan sosialisai penerapan CBIB di sentra – sentra budidaya dan pembudidaya. Penerapan sertifikasi CBIP dan MPM dapat menekan masalah hama penyakit ini karena berkaitan dengan biosecurity pada panti benih dan wadah budidaya.
- c. Dilaksanakannya program bersama antara Dinas Perikanan Kab. Berau Dengan Balai Pengelolaan Wilayah Sungai III Kementerian PU yang sudah bersinergi dari tahun 2013 melalui kegiatan peninggian tanggul dan pembuatan jaringan tata air tambak di beberapa kampung (Tabalar Muara, Seketa dan Suaran).
- d. Menciptakan peluang usaha masyarakat dengan melibatkan pokdakan dalam hal
 - Penguatan UPR (Unit Pembenihan Rakyat) dalam rangka menghasilkan benih yang berkualitas yaitu di Rinding dan Gunung Tabur
 - Produksi pakan mandiri dengan harga yang terjangkau dan memiliki kualitas yang baik yaitu di Talisayan dan Teluk Bayur
 - Pembuatan dempond dalam rangka penerapan teknologi tepat guna yaitu bioflok vaname yang dilaksanakan di Mantaritip dan bioflok lele yang dilaksanakan di Rinding.



Dalam upaya mencapai sasaran ke-1 dengan dua indikator kinerja di atas maka Dinas Perikanan telah mengalokasikan anggaran dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 25. Alokasi per sasaran dan capaiannya

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya produksi komoditi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	3,166,996,000	2,154,895,718	68.04
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	2,546,357,000	2,392,359,697	93.95
Total			5,713,353,000	4,547,021,415	80%

Tabel di atas adalah alokasi per sasaran yang didukung oleh program kegiatan yang berasal dari dana APBD II Kabupaten Berau dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sementara untuk program kegiatan yang berasal dari Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) tidak bisa diikuti untuk penghitungan alokasi per sasaran dikarenakan dana tersebut dialokasikan satu kali untuk beberapa tahun pelaksanaan (multiyears) sehingga tidak diketahui target anggaran per tahun.

Capaian-capaian penting yang didapatkan Dinas Perikanan terkait pencapaian sasaran kinerja yaitu :

a. Penghargaan Tingkat Propinsi

Prestasi yang diterima Dinas Perikanan Kab. Berau Pada Tahun 2018 adalah Panji keberhasilan pembangunan dengan predikat Terbaik I di Bidang Kelautan dan Perikanan oleh Gubernur Kalimantan Timur Dalam Rangka HUT Ke-62 Provinsi Kalimantan Timur.



b. Penghargaan Tingkat Kabupaten

Penghargaan Juara II KORPRI AWARD 2018 atas Inovasi “Satu Kampung Budidaya Perikanan” (SIAP SEDIA) oleh Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau.



1.6. Analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumberdaya adalah perbandingan antara realisasi capaian kinerja dengan penyerapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai target sasaran yang ditentukan.

Tabel 26. Efisiensi atas penggunaan sumberdaya

Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
Meningkatnya produksi komoditi perikanan	Jumlah produksi perikanan tangkap	100 %	68.05 %	1.47
	Jumlah produksi perikanan budidaya	105.25	93.95 %	1.12
Rata-rata		102.63	80%	1.28

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sasaran ke -1 Dinas Perikanan yang ditunjukkan oleh kedua indikator tersebut dan didukung oleh 4 program dan 7 kegiatan terjadi efisiensi atas penggunaan sumberdaya dengan tingkat efisiensi 1.28 yang artinya penggunaan Rp 1 menghasilkan 1.28 satuan kinerja. Dari masing-masing indikator kinerja pun memperlihatkan bahwa penggunaan anggaran adalah efisien dalam mencapai sasaran.

Tingkat Capaian Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2018 seperti yang diperlihatkan pada tabel 15 sebelumnya adalah 100 %. Di sisi lain penggunaan



sumberdaya yang ada dalam hal ini pelaksanaan program (penggunaan anggaran belanja) secara langsung atau tidak langsung menunjang capaian kinerja.

Upaya pencapaian indikator tersebut ditunjang dengan 2 Program dan 2 kegiatan yang masing-masing bersumber dari dana APBD Kabupaten Berau dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dari pagu program kegiatan yang sebesar Rp3.166.996.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 2.154.895.718,- atau tingkat capaian sebesar 68.04 %. Dengan kata lain tingkat efisiensi capaian indikator ini sebesar 1,47 (100%/68.05 %)(efisien). Dengan capaian efisiensi tersebut, dapat menggambarkan efisiensi pelaksanaan program kegiatan, yaitu setiap Rp.1,-dapat dipergunakan untuk menghasilkan 1,47 satuan hasil kinerja.

Sementara untuk indikator jumlah produksi perikanan budidaya menunjukkan tingkat capaian sebesar 105.25 %. Upaya pencapaian indikator tersebut ditunjang dengan 3 Program dan 6 kegiatan yang masing-masing bersumber dana dari APBD Kabupaten Berau dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dari pagu program kegiatan yang sebesar Rp 2,546,357,000 -dapat direalisasikan sebesar Rp. 2,392,359,697.-atau tingkat capaian sebesar 93.95 %. Dengan kata lain tingkat efisiensi capaian indikator ini sebesar 1.12 (105.25% /93.95) (efisien). Dengan capaian efisiensi tersebut, dapat menggambarkan efisiensi pelaksanaan program kegiatan, yaitu setiap Rp.1,-dapat dipergunakan untuk menghasilkan 1.12 satuan hasil kinerja.

1.7. Analisa program/kegiatan yang menunjang capaian indikator kinerja sasaran

Dalam upaya untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yaitu Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya, maka Dinas Perikanan telah melaksanakan Program dan Kegiatan yang sumber dananya dari APBD II dan Dana Alokasi Khusus Tahun 2018 yaitu sebagai berikut :

Tabel 27. Program Kegiatan Penunjang Sasaran
Meningkatnya Produksi Komoditi Perikanan Tahun 2018

No	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Sumber Dana
			Target	Realisasi	
1	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	41,6%	38,5,6%	APBD II



	- Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jumlah KUB yang menerima bantuan saptas tangkap	17 kelompok	9 kelompok	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi	Peningkatan produktivitas usaha	1,25 %	1,25%	DAK
	- Peningkatan produksi dan sarana prasarana perikanan (DAK)	Jumlah sarana penangkapan ikan	5 paket	5 paket	
3	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Luas lahan perikanan budidaya	7,026.95 ha	9.074.06 ha	APBD II
	- Pengembangan Perbenihan Rakyat	Jumlah UPR yang mendapat pembinaan	2 unit	11 unit	
	- Pengembangan Budidaya Perikanan Air Tawar	Wilayah penerima bantuan yang dilakukan pembinaan	15 kampung	17 kampung	
	- Pengembangan Balai Benih Ikan Air Tawar	Jumlah saptas operasional BBI	5 paket	5 paket	
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi	Peningkatan produktivitas usaha	1,25 %	1,25%	DAK
	- Peningkatan produksi dan sarana prasarana perikanan (DAK)	Jumlah sarana budidaya	3 paket	3 paket	
5	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Jumlah sentra kawasan perikanan budidaya	1 kawasan	1 kawasan	APBD II
	- Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Wilayah diterapkannya teknologi perikanan budidaya	3 kawasan	3 kawasan	
	- Monitoring hama dan penyakit ikan	Wilayah yang dimonitor	8 kecamatan	8 kecamatan	



Program kegiatan yang anggarannya bersifat multiyears yang mendukung pencapaian sasaran

1	Program Penanaman Pohon di Luar Kawasan	Prosentase peningkatan produksi air payau	2,5 %	0	DBH-DR
	Penanaman pohon di kawasan mangrove	Jumlah kawasan mangrove	2 kawasan	0	

Program kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran yang indikatornya adalah jumlah produksi perikanan tangkap pada dasarnya adalah dalam bentuk pengadaan atau alokasi sarana dan prasarana perikanan tangkap seperti mesin dan alat tangkap ramah lingkungan yang akan diserahkan kepada kelompok-kelompok nelayan dalam hal ini Kelompok Usaha Bersama yang ada di beberapa kampung di Kabupaten Berau. Sasaran dari program di atas adalah meningkatnya produktivitas penangkapan dari kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan sehingga dapat mendukung tercapainya sasaran Dinas Perikanan yaitu meningkatnya jumlah produksi perikanan dalam hal ini perikanan tangkap. Namun dari tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator output capaian KUB yang menerima bantuan tidak memenuhi target, hal ini diakibatkan pada saat pengadaan lelang mesin kapal, rekanan/pihak ketiga tidak melaksanakannya dengan baik dimana rekanan/pihak ketiga tidak bisa mengirimkan barang sesuai kontrak dengan batas waktu yang telah ditentukan, sehingga tidak bisa dilakukan pencairan, hal ini berakibat juga pada rendahnya realisasi fisik dan keuangan. Namun demikian tidak tercapainya tercapainya target kegiatan di atas tidak menyebabkan penurunan produksi perikanan tangkap karena beberapa KUB tetap mendapatkan bantuan sarana prasarana penangkapan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018. Selain itu, alat tangkap yang sudah diterima beberapa KUB adalah alat tangkap yang tingkat efektivitas pemanfaatannya baik sehingga produktivitasnya tinggi dan bisa meningkatkan produksi penangkapan.

Sementara program kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran dengan indikator jumlah perikanan budidaya seperti yang tersaji di tabel 27 berasal dari dana APBD Kabupaten Berau dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018. Program kegiatan tersebut secara umum dapat terlaksana dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari



tercapainya output-output kegiatan yang sudah ditargetkan untuk mencapai outcome program dan pada akhirnya mendukung pencapaian sasaran. Dalam mencapai sasaran meningkatnya produksi perikanan khususnya perikanan budidaya, ada dukungan program kegiatan yang berasal dari Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) seperti yang terlihat pada tabel di atas. Anggaran sebesar Rp. 8,500,000,000 adalah anggaran yang sifatnya multiyears artinya tidak habis dalam satu tahun namun untuk beberapa tahun ke depan sampai output dan outcome tercapai. Output dan outcome yang diharapkan dari program kegiatan tersebut belum bisa dicapai pada tahun ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

- DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) DBH-DR baru disahkan pada bulan juli tahun 2018 sehingga ada keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan
- Pada tahun 2018 pelaksanaan kegiatan barau sampai pada tahap survey lokasi. Dari hasil survey tersebut ditemukan bahwa lahan yang tersedia untuk kegiatan penanaman mangrove di luar kawasan masih sedikit, hal ini karena tergantung dari status lahan yang tersedia dan kesepakatan dengan pihak kampung dalam hal ini adalah petambak. Jumlah luas lahan yang disepakati sekitar 100 Ha yang tersebar di 2 kawasan yaitu area utara dengan lokasi Kasai, Semanting, Bingkar dan Pl. Badak-Badak dan area selatan dengan lokasi Suaran, Mantaritip, Tabalar Muara dan Biatan, selain itu jarak antara lokasi penanaman yang satu dengan yang lain jauh sehingga memerlukan biaya operasional yang tinggi dalam hal pengangkutan dan distribusi bibit yang nantinya dilakukan pada saat kegiatan, untuk menyikapi hal tersebut pihak Dinas berkeinginan agar kegiatan penanaman mangrove diluar kawasan yang nantinya dapat dilaksanakan melalui kegiatan penunjukan langsung sementara dana di DPA tertulis secara global sehingga secara pelaksanaan kegiatan yang ada melalui mekanisme lelang. Koordinasi dengan pihak LPSE sangat dibutuhkan terhadap kegiatan tersebut apakah nantinya kegiatan penanaman mangrove ini dapat dilakukan berdasarkan mekanisme penunjukan langsung berdasarkan sebaran area lokasi tanam dan juga belum adanya standarisasi daerah terkait kegiatan penanaman mangrove di luar kawasan. Apabila mengacu kepada standar kementerian maka dikhawatirkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan mengingat standar kementerian terlalu kecil untuk dilaksanakan di daerah dengan lokasi yang berjauhan. Standar kementerian untuk penanaman mangrove di luar kawasan sekitar Rp. 5.000.000,-/ha termasuk kegiatan penanaman, distribusi bibit,



pembuatan ajir, pembuatan patok, pemasangan papan nama dan pembuatan pondok jaga. Saran dari Kementerian diperbolehkan untuk mengacu kepada standar Provinsi atau Kabupaten terhadap kegiatan penanaman mangrove di luar kawasan. Hal-hal tersebut di atas menyebabkan realisasi fisik DBH DR baru sebesar 2,41% dan keuangan sebesar 2,42%.

2. Sasaran : Meningkatnya Kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan

2.1 Perbandingan capaian indikator kinerja terhadap target 2018

Tabel 28. Perbandingan capaian indikator kinerja terhadap target 2018

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	%
1	Jumlah kelembagaan pelaku utama perikanan yang naik kelas	9 kelompok	8 kelompok	88,89

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sasaran yang ingin dicapai dengan indikator kinerja jumlah kelembagaan pelaku utama perikanan yang naik kelas pada tahun 2018 sebanyak 9 kelompok hanya berhasil dicapai 8 kelompok dengan presentase 88,89 % dengan predikat **Berhasil**. Indikator jumlah kelembagaan pelaku utama perikanan yang naik kelas merupakan penghitungan banyaknya kelompok perikanan yang naik kelas yaitu dari kelas pemula menjadi kelas madya atau dari kelas madya ke kelas mandiri dalam satu tahun. Pelaku utama perikanan yang naik kelas tersebut tentunya adalah kelompok kelompok perikanan yang telah mendapatkan pembinaan kelembagaan oleh Dinas Perikanan melalui Bidang Pemberdayaan Masyarakat bekerjasama dengan penyuluh perikanan di wilayah mereka bertugas yaitu berjumlah 78 pelaku usaha perikanan. Kelembagaan pelaku utama perikanan yang berhasil naik kelas dalam hal ini dari kelas pemula ke kelas madya adalah seperti yang terlihat pada taebel di bawah ini :

Tabel 29. Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan yang Naik Kelas

No	Pelaku Utama Perikanan	Lokasi
1	KUB. Talisayan Lestari 03	Kampung Talisayan kecamatan Talisayan



2	KUB. Panulayan	kampung Tanjung Batu kecamatan Pulau Derawan
3	KUB. Sehati	kampung Giring-Giring kecamatan Biduk-Biduk
4	KUB. Samudra Jaya	kampung Sukan Tengah Kecamatan Sambaliung
5	KUB. Selangat Jaya	Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb
6	KUB. Nelayan Gurimbang Membangun	kampung Gurimbang Kec. Sambaliung
7	KUB. Sumber Rezaki	Kampung Tabalar Kecamatan Tabalar
8	KUB. Rantau Tarik	Kampung Tabalar Muara Kec. Tabalar

Sumberdata : Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan kelas kelompok (naik kelas) dari kelas pemula ke kelas madya dinilai oleh Tim Penilai yang berjumlah 5 orang yaitu 3 orang dari kecamatan, 1 orang dari UPTD Perikanan di wilayah kelompok tersebut dan 1 orang penyuluh perikanan di wilayah tersebut yang SK nya ditanda tangani oleh Camat di wilayah setempat. Adapun beberapa diantara kriteria penilaian tersebut adalah penguasaan teknologi, pengorganisasian, skala usaha, kemampuan permodalan, kemitraan/kerjasama dan akses informasi pasar. Berdasarkan tingkat penilaian stratifikasi kemampuan kelembagaan tersebut, maka kelas pemula yang akan naik ke kelas madya sudah melakukan kegiatan perencanaan meskipun masih terbatas dengan batas nilai scoring 351-360 serta mendapatkan piagam pengukuhan yang sudah ditandatangani oleh Camat setempat.

Dengan naiknya delapan kelompok pemula menjadi kelompok madya maka hal ini bisa menjadi indikator meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan walaupun belum untuk semua kelompok perikanan. Kelompok perikanan yang naik kelas dari pemula ke madya telah melakukan perencanaan walaupun terbatas yaitu kemampuan dalam



mengidentifikasi potensi wilayah dan sumberdaya perikanan yang ada di wilayah lingkungannya, kemampuan menggunakan teknologi yang dibutuhkan baik untuk proses produksi maupun pasca panen, kemampuan menyusun RUK (Rencana Usaha Kerja), kemampuan dalam penyusunan rencana kegiatan di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran, kemampuan dalam mendapatkan akses kelembagaan, kemampuan dalam wirausaha, kemampuan dalam mendapatkan modal usaha, kemampuan bermitra dengan lembaga keuangan. Dengan kemampuan-kemampuan tersebut maka Kelompok Perikanan bisa mengembangkan kelompoknya sehingga bisa lebih maju dalam berusaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun tanpa bantuan baik dari swasta maupun Pemerintah.

2.2. Perbandingan capaian kinerja dengan capaian tahun-tahun sebelumnya

Tabel 30. Perbandingan capaian kinerja tahun 2018 dengan empat tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Realisasi					
		satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah kelembagaan pelaku utama perikanan yang naik kelas	kelompok	-	-	-	-	8

Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak ada realisasi dari tahun 2014 s.d 2017 dikarenakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang khusus melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan baru terbentuk pada tahun 2018. Walaupun kegiatan pembinaan sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya melalui Bidang Budidaya dan Penangkapan namun belum ada target untuk mencapai indikator kinerja sasaran kelembagaan pelaku utama perikanan yang naik kelas.

2.3 Perbandingan capaian kinerja tahun 2018 dengan tatget dalam Renstra

Untuk mengetahui pencapaian kinerja tahun ini dan target di tahun berikutnya sebagai upaya untuk mengontrol kinerja Dinas Perikanan dalam mendukung sasaran Pemerintah Kabupaten Berau yang tertuang dalam RPJMD Kab. Berau, maka perlu disajikan data pencapaian kinerja tahun yang sedang dievaluasi dengan target yang ada dalam Renstra (Rencana Srtategis) Dinas Perikanan. Berikut data yang dimaksud :



Tabel 31. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target dalam Renstra

No	Indikator Kinerja	2018			Target dalam Renstra		
		satuan	Target	Realisasi	2019	2020	2021
1	Jumlah kelembagaan pelaku utama perikanan yang naik kelas	kelompok	9	8	9	9	9

2.4. Perbandingan capaian kinerja tahun 2018 dengan standar nasional

Tabel 32. Perbandingan capaian kinerja tahun 2018 dengan standar nasional

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2018	Capaian Nasional Tahun 2017	% terhadap Nasional
Jumlah kelembagaan pelaku utama perikanan yang naik kelas	8 kelompok	1.000 kelompok	0,8 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian produksi nasional yang disajikan adalah capaian tahun 2017 dikarenakan data tahun 2018 belum dipublikasikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun demikian dapat dilihat bahwa Kabupaten Berau berkontribusi sebesar 0,8 % terhadap capaian nasional tahun 2017.

2.5. Analisis keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan alternative solusi yang telah dilakukan

Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa sasaran yang ingin dicapai dengan indikator jumlah kelembagaan pelaku utama perikanan yang naik kelas tahun 2018 sebesar 9 kelompok, hanya 8 kelompok yang berhasil dicapai. Namun demikian hal tersebut adalah pencapaian yang berhasil dari Dinas Perikanan. Faktor penyebab keberhasilan pencapaian sebesar 88,89 % adalah diantaranya :

- Adanya dukungan dari UPT Dinas Perikanan dan penyuluh perikanan yang berada di wilayah kerja masing-masing



- Dilaksanakannya pembinaan kelembagaan melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan pengisian administrasi kelompok dan manajerial kelompok kepada pelaku utama perikanan baik dari Dinas Perikanan yaitu Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- Adanya bantuan sarana prasarana baik penangkapan maupun budidaya kepada pelaku utama perikanan sehingga memberikan motivasi untuk membenahi kelompok mereka baik secara manajerial maupun administrasi kelompok.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target 9 kelompok adalah sebagai berikut :

- Walaupun pembinaan aktif dilakukan namun masih ditemui permasalahan yaitu masih rendahnya kemandirian kelembagaan pelaku utama perikanan terutama pengetahuan mereka tentang administrasi kelompok, manajemen kelompok dan kas kelompok.
- Masih minimnya jumlah penyuluh perikanan, dimana saat ini 1 (satu) penyuluh perikanan masih membina 1 s.d 3 kecamatan.
- Masih minimnya kegiatan pelatihan dalam penambahan atau peningkatan wawasan pelaku utama perikanan

Solusi yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan dengan adanya permasalahan diatas sehingga bisa mencapai target yang telah ditentukan pada tahun berikutnya adalah :

- Kegiatan pembinaan kelembagaan yang dilakukan bukan hanya dari Dinas Perikanan dalam hal ini Bidang Pemberdayaan Masyarakat tapi juga bekerjasama dengan UPTD dinas perikanan dan penyuluh perikanan di wilayah setempat
- Dinas Perikanan telah mengusulkan penambahan jumlah penyuluh perikanan lewat formasi yang diadakan oleh BKPP Kabupaten Berau
- Memberikan reward/penghargaan kepada pelaku utama perikanan yang mandiri di kelas pemula diantaranya mengikutsertakan pelaku utama perikanan dalam kegiatan/pelatihan di luar daerah untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi mereka

Dalam upaya mencapai sasaran ke-2 seperti yang telah diperlihatkan pada tabel Perjanjian Kinerja maka Dinas Perikanan telah mengalokasikan anggaran dengan capaian sebagai berikut :



Tabel 33. Alokasi per sasaran dan capaiannya

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan	Jumlah kelembagaan pelaku utama perikanan yang naik kelas	206,100,000	185,654,500	90.08

2.6 Analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumberdaya adalah perbandingan antara realisasi capaian kinerja dengan penyerapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai target sasaran yang diperoleh.

Capaian sasaran memingkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan dengan indikatornya jumlah kelembagaan pelaku utama perikanan yang naik kelas Tahun 2018 seperti yang diperlihatkan pada tabel 15 adalah 88,89%. Di sisi lain penggunaan sumberdaya yang ada dalam hal ini pelaksanaan program (penggunaan anggaran belanja) secara langsung atau tidak langsung juga menunjang capaian kinerja.

Upaya pencapaian indikator tersebut ditunjang dengan 1 Program dan 1 kegiatan. Dari pagu program kegiatan yang sebesar Rp206.100.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 185.654.500,- atau tingkat capaian sebesar 90.08 %. Dengan kata lain tingkat efisiensi capaian indikator ini sebesar 0.98 (88.89%/90.08). Berikut tabel efisiensi penggunaan sumberdaya dimaksud :

Tabel 34. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan	Jumlah kelembagaan pelaku utama perikanan yang naik kelas	88.89 %	90.08 %	0.98

2.7. Analisa program/kegiatan yang menunjang capaian indikator kinerja sasaran

Dalam upaya untuk mecapai target sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan indikator jumlah kelembagaan pelaku utama



perikanan yang naik kelas , maka Dinas Perikanan melaksanakan Program dan Kegiatan yang sumber dananya dari APBD II Kabupaten Berau yaitu sebagai berikut :

Tabel 35. Program Kegiatan Penunjang Sasaran
Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Tahun 2018

No	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Perikanan	Prosentase kelompok pemula	17%	17%
	Pembinaan Kelompok Masyarakat Perikanan	Jumlah kelompok nelayan dan pembudidaya yang dibina	55 kelompok	78 kelompok

Program kegiatan di atas pada dasarnya berupa pembinaan kelembagaan yaitu pembinaan tentang manajemen kelompok di antaranya pembentukan kelompok, kerjasama kelompok, dinamika kelompok dan pengembangan administrasi kelompok yang dilaksanakan ke 78 kelompok perikanan yang ada di beberapa kampung di Kab, Berau. Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat bahwa target bisa terlampaui dikarenakan masih banyak kelembagaan pelaku utama perikanan yang sudah terbentuk tetapi belum memenuhi persyaratan administrasi seperti belum adanya SK dari Kepala Kampung, dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Dinas Perikanan sehingga banyak kelompok yang ikut pembinaan untuk melengkapi legalitas kelompok sekaligus administrasi kelompok walaupun di luar target yang ditetapkan. Banyaknya kelompok yang masih belum lengkap legalitas kelompok dan juga administrasi kelompok menyebabkan belum tercapainya target jumlah kelembagaan pelaku utama perikanan yang naik kelas karena kelompok tersebut masih banyak yang belum memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.

3.4 Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan merupakan sarana pengukuran dalam alokasi dana yang mendukung pencapaian sasaran dengan indikator sasaran program dan pencapaian kegiatan dengan indikator kinerja, meliputi output dan outcome. Selanjutnya Dinas



Perikanan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 telah melaksanakan 2 (dua) sasaran utama, dengan 9 program dan 26 kegiatan dengan dana baik dalam bentuk belanja tidak langsung maupun belanja langsung yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Berau dan Dana Alokasi Khusus dengan anggaran sebesar Rp. 13,781,848,000 dan terealisasi sebesar Rp.11,800,353,779,- atau sebesar 85.62 % yang dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2018 pada Dinas Perikanan Kabupaten Berau adalah sebesar Rp. **5.793.540.036,-** atau sebesar **90.91 %** dari anggarannya sebesar **Rp 6.372.900.000,-** Anggaran dan realisasi belanja tidak langsung tersebut dapat diuraikan, sebagai berikut:

Tabel 36. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Th. 2018

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)
1	Belanja Pegawai	6,372,900,000.00	5,793,540,036	90.91
	JUMLAH	6,372,900,000.00	5,793,540,036	90.91

2. Realisasi Anggaran Belanja Langsung

2.1. Realisasi Anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Berau dan Dana Alokasi Khusus Tahun 2018

Pada tahun 2018, untuk melaksanakan 8 program dengan 25 kegiatan, Dinas Perikanan mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp 7,408,948,000,-** yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Berau dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2018 terealisasi sebesar Rp **6,006,813,743,- (81.08%)**. Berikut disajikan tabel anggaran dan realisasi belanja langsung per sasaran strategis Dinas Perikanan Tahun 2018 sesuai yang tertera pada Perjanjian Kinerja tahun 2018



Tabel 37. Realisasi Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Dinas Perikanan Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%tase	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%tase %
					Program Administrasi Perkantoran	1,277,680,000	1,084,814,578	84.91
					- Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	1,500,000	1,385,000	92.33
					- Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	173,500,000	132,709,023	76.49
					- Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/Operasional	275,000,000	150,508,950	54.73
					- Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	107,671,000	102,681,000	95.37
					- Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	100,000,000	93,963,752	93.96
					- Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15,000,000	9,195,000	61.30
					- Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	25,000,000	24,997,500	99.99
					- Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan Pengandaan	5,000,000	4,266,000	85.32
					- Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,000,000	3,940,000	78.80



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% tase	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% tase %
					- Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5,000,000	3,840,000	76.80
					- Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	30,000,000	27,888,200	92.96
					- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	285,000,000	283,205,343	99.37
					- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	70,382,000	63,710,000	90.52
					- Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran	179,627,000	179,524,810	99.94
					PROGRAM	5,000,000	4,760,000	95.20
					PENINGKATAN			
					PENGEMBANGAN			
					SISTEM PELAPORAN			
					CAPAIAN KINERJA DAN			
					KEUANGAN			
					- Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	5,000,000	4,760,000	95.20



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%tase	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%tase %
Meningkatnya produksi komoditi perikanan	Jumlah Produksi perikanan budidaya	2,227.72 ton	2,344.65 ton	105.25	PROGRAM PENGEMBANGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELAUTAN PERIKANAN	206,815,000	184,563,250	89.24
					- Kegiatan Konsolidasi Pengembangan Perencanaan Pembangunan Perikanan	106,315,000	98,449,345	92.60
					- Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perikanan	100,500,000	86,113,905	85.69
					PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	1,495,450,000	1,429,797,025	95.61
					- Kegiatan Pengembangan Budidaya Perikanan Air Tawar	369,418,000	339,519,255	91.91
-Kegiatan Pengembangan Balai Benih Ikan Air Tawar	1,060,416,000	1,031,694,150	97.29					



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%tase	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%tase %
					- Pengembangan Perbenihan Rakyat	65,616,000	58,583,620	89.28
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIR TAWAR	631,275,000	585,903,172	92.81
					- Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	560,715,000	526,446,202	93.89
					- Monitoring hama dan penyakit ikan	70,560,000	59,456,970	84.26
					PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN	419,632,000	376,425,500	89.70
					- Peningkatan produksi dan sarana prasarana perikanan (DAK)	419,632,000	376,425,500	89.70



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% tase	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% tase %
	Jumlah Produksi perikanan tangkap	18,380.34 ton	18,380.50 ton	100.00	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	2,255,246,000	1,254,214,718	55.61
					- Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	2,255,246,000	1,254,214,718	55.61
					PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA PRODUKSI	911,750,000	900,681,000	98.79
					- Kegiatan Peningkatan Produksi dan Sarana Prasarana Perikanan (DAK)	911,750,000	900,681,000	98.79
Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan	Jumlah kelembagaan pelaku utama perikanan yang naik kelas	9 klpk	8 klpk	88.89	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERIKANAN	206,100,000	185,654,500	90.08
					- Pembinaan kelompok masyarakat perikanan	206,100,000	185,654,500	90.08
						7,408,908,000	6,006,813,743	81.08



2.2. Realisasi Anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR)
Tahun 2018 (multiyears)

Tabel 38. Realisasi Anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil- Dana Reboisasi (DBH-DR)

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% tase %
PROGRAM PENANAMAN POHON PADA LAHAN DI LUAR KAWASAN	8,500,000,000	204,806,258	2.41
- Penanaman di kawasan mangrove (DBH-DR)	8,500,000,000	204,806,258	2.41



BAB IV P E N U T U P

Pada tahun 2018 Dinas Perikanan melaksanakan 2 (dua) sasaran strategis yaitu meningkatnya produksi komoditi perikanan dan meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan. Setelah dilaksanakan pengukuran atas semua indikator kinerja kedua sasaran strategis tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran pertama yaitu meningkatnya produksi komoditi perikanan sebesar 102.63 % dengan kategori **sangat berhasil** dan untuk sasaran kedua yaitu meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan sebesar 88.98 % dengan **kategori berhasil**. Sedangkan anggaran belanja langsung yang digunakan dalam mewujudkan sasaran tersebut sebesar **81.08 %**.

Walaupun tingkat pencapaian sasaran termasuk kategori sangat berhasil dan berhasil baik dari aspek kinerja dan aspek keuangan, namun masih perlu ditingkatkan lagi karena belum semua indikator kinerja tercapai sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakan. Selanjutnya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada tahun mendatang maka Dinas Perikanan dengan Bidang-Bidang yang ada sebagai penggerak program kegiatan untuk mencapai sasaran yaitu Bidang Budidaya, Bidang Penangkapan dan Pelayanan Usaha dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat perlu lebih meningkatkan koordinasi dan kerjasama satu sama lain, demikian juga dengan masing-masing bidang harus saling memberikan masukan dan informasi terkait pelaksanaan program kegiatan dan tentunya masing-masing harus berkomitmen sungguh-sungguh dengan kerja nyata untuk mewujudkan target-target yang telah ditentukan dan yang paling penting adalah menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan pencapaian sasaran sehingga target-target yang belum tercapai tahun ini bisa dicapai di tahun selanjutnya.



LAMPIRAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Perikanan
Tahun Anggaran : 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya produksi komoditi perikanan	Produksi Perikanan Tangkap	18,380.34 ton
		Produksi Perikanan Budidaya	2,227.72 ton
2	Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya	Jumlah Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan yang Naik Kelas	9 kelompok

7437002883

8526896000

87.21817274

PERJANJIAN KINERJA REVISI

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Perikanan
Tahun Anggaran : 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya produksi komoditi perikanan	Produksi Perikanan Tangkap	18,380.34 ton
		Produksi Perikanan Budidaya	2,227.72 ton
2	Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya	Jumlah Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan yang Naik Kelas	9 kelompok

Program :

Anggaran :

Keterangan :

1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp	1,277,680,000	APBD KAB. BERAU
2	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Rp	5,000,000	APBD KAB. BERAU
3	PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN			
4	PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Rp	1,495,450,000	APBD KAB. BERAU
5	PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIR TAWAR	Rp	2,255,246,000	APBD KAB. BERAU
		Rp	631,275,000	APBD KAB. BERAU
6	PENINGKATAN PRODUKSI DAN SARANA PRASARANA PERIKANAN (DAK)	Rp	1,331,382,000	DAK
7	PENGEMBANGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELAUTAN PERIKANAN	Rp	206,815,000	APBD KAB. BERAU
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERIKANAN	Rp	206,100,000	APBD KAB. BERAU
9	PENANAMAN POHON PADA LAHAN DI LUAR KAWASAN	Rp	8,500,000,000	DBH DR
		Rp	15,908,948,000.00	

7437002883
8526896000
87.21817274

PENGUKURAN KINERJA

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Perikanan
Tahun Anggaran : 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya produksi komoditi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	18,380.34 ton	18,380.50 ton	100.00
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	2,227.72 ton	2,344.65 ton	105.25
2	Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan	Jumlah Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan yang Naik Kelas	9 kelompok	8 kelompok	88.89

Program :	Anggaran :	Realisasi :
1 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp 1,277,680,000	Rp 1,084,580,578
2 PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KETIANGAN	Rp 5,000,000	Rp 4,760,000
3 PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	Rp 1,495,450,000	Rp 1,429,797,025
4 PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Rp 2,255,246,000	Rp 1,254,214,718
5 PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIR TAWAR	Rp 631,275,000	Rp 586,137,172
6 PENINGKATAN PRODUKSI DAN SARANA PRASARANA PERIKANAN (DAK)	Rp 1,331,382,000	Rp 1,277,106,500
7 PENGEMBANGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELAUTAN PERIKANAN	Rp 206,815,000	Rp 184,563,250
8 PROGRAM PENANAMAN POHON DI LUAR KAWASAN (DBH-DR)	Rp 8,500,000,000	Rp 204,806,258
9 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERIKANAN	Rp 206,100,000	Rp 185,654,500
	Rp 15,908,948,000	Rp 6,211,620,001

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BERAU 2016-2021**

Instansi : Dinas Perikanan Kabupaten Berau

Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan
4. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
5. Pelaksanaan UPTD
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	PENJELASAN/FORMULA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya produksi komoditi perikanan	1. Produksi perikanan tangkap 2. Produksi perikanan budidaya	ton	Untuk mengetahui berapa produksi perikanan tangkap Kab. Berau tahun 2018	total produksi dari semua kegiatan sub sektor perikanan tangkap total produksi dari semua kegiatan sub sektor perikanan budidaya	- Bidang Budidaya - Laporan statistik tahun 2018	Kabid penangkapan dan pelayanan usaha Kabid Budidaya





Tanjung Redeb, April 2018
Kepala Dinas


Fuadi, SE

NIP. 19581026 198303 1 005



SOP Pengumpulan Data Kinerja

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Pengelola Data Perencanaan	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada masing-masing bidang			format data	5 menit	data kinerja	SOP LKJIP
2	Menghimpun data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang			data kinerja	10 menit	data kinerja	
3	Menganalisa dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul sebagai bahan penyusunan laporan kinerja			data kinerja	7 hari	data kinerja	
4	Verifikasi Data Laporan Kinerja yang sudah terkumpul Oleh Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset			draft laporan kinerja	1 hari	draft laporan kinerja	